

**AKTIVITAS HUMAS BADAN LINGKUNGAN HIDUP (BLH)  
PROVINSI RIAU DALAM MENANGGULANGI TINGKAT  
PENCEMARAN SUNGAI SIAK DI KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Komunikasi  
Pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi**



**OLEH :**

**RAHMADI**

**NIM. 10743000218**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN ILMU KOMUNIKASI**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2012**

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT karena hanya berkat dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “ Aktivitas Humas Badan Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Tingkat Pencemaran Sungai Siak di Kota Pekanbaru” Atas selesainya Sripsi ini, tak lupa penulis turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Orang tua dan keluarga penulis yang tercinta dimana telah banyak memberikan dukungan moril dan spiritual kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Nazir Karim, MA Rektor UIN Suska Riau
3. Bapak Prof. Dr. Amril, MA Sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
4. Bapak Dr. Nurdin A. Halim selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi FDIK UIN SUSKA RIAU yang telah berkenan menerima dan mengarahkan Skripsi ini.
5. Bapak Drs. Suhaimi D, M.Si dan Ibu Titi Antin, M.Si Sebagai pembimbing yang telah berkenan membimbing dan mengarahkan saya selama mengerjakan skripsi ini dan juga telah memberikan banyak masukan, semangat, dan dukungan kepada penulis
6. Kanda Falkoni, SE dan kanda Indira Ekawati, M.Si, Kanda Indrawati, Bang Ronal, Bang devi, adek hidayat yang telah mengontrol dan mengarahkan saya dalam mengasih semangat terciptanya skripsi ini

7. Seseorang yang terbaik yang selalu menyupport dan membantu penulis dalam menulis skripsi ini adinda Riza Fitriana, Abang doain semoga adek bisa menyusul untuk mendapat kan gelar sarjana aminnn...
8. Teman – Teman Angkatan 07 FDIK UIN SUSKA Riau jurusan Ilmu Komunikasi konsentrasi PR. Khususnya kelas PR A selamat berjuang teman – teman, mudah – mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan kita semua bisa WISUDA tahun ini juga. Amin ya rabbal alamin.
9. Untuk kawan-kawan yang setiap malam ngumpul bersama Supriadi,S.Ikom, Masdir Manto, S.Sos, Sepeb Delem, SE, Deka Irawan, S.Pdi, om Ardius, tony, oka , Bujang, Mas Jek, dan Teman-teman lainnya.
10. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga ALLAH SWT membalas atas segala bantuannya, dan kiranya Tuhan memberkati dan membalas kebaikan yang lebih besar dari yang mereka berikan selama ini. Penulis menyadari akan keterbatasan kelemahan dalam ilmu pengetahuan dan pengalaman, sehingga penulis mengharapkan saran, masukan dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, tiada kata lain harapan penulis, semoga skripsi ini dengan segala kekurangan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca, Amin.

Pekanbaru, Januari 2012

**RAHMADI**

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	v
ABSTRAK .....	vi
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	6
C. Penegasan Istilah .....	6
D. Permasalahan.....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
F . Kerangka Teoritas.....	11
G . Konsep Operasional .....	22
H. Metode Penelitian.....	23
I. Sistematika Penulisan .....	27
BAB II    GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	29
A. Deskripsi BLH Provinsi Riau .....	29
B, Kedudukan BLH Provinsi Riau .....	29
B. Tugas Pokok BLH Provinsi Riau.....	30
C. Visi dan Misi BLH Provinsi Riau .....	30
D. Struktur Organisasi BLH Provinsi Riau .....	36
BAB III    PENYAJIAN DATA .....	44
A. Aktivitas Humas BLH Provinsi Riau Dalam Menanggulangi Tingkat Pencemaran Sungai Siak di Kota Pekanbaru.....	45

B.	Mobilitas Sosial Masyarakat di Bantaran Sungai Siak di Kota Pekanbaru .....	48
C.	Faktor Pendukung dan Faktor-faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Menanggulangi Pencemaran Sungai Siak di Kota Pekanbaru .....	59
BAB IV	ANALISIS DATA .....	66
A.	Aktivitas Humas BLH Provinsi Riau .....	66
B.	Faktor Pendukung dan Faktor-faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Menanggulangi Pencemaran Sungai Siak di Kota Pekanbaru .....	79
BAB V	PENUTUP .....	83
A.	Kesimpulan .....	83
B.	Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur Organisasi BLH Provinsi Riau.....	43
2. Himbauan BLH Provinsi Riau Larangan Membuang Sampah .....	47
3. Bentuk Pengelolaan Limbah B3 .....	48

## ABSTRAK

Kerusakan dan pencemaran lingkungan dalam periode beberapa dekade akhir-akhir ini menjadi perhatian dan sumber pengkajian yang tidak ada habis-habisnya. Hingga saat ini, pencemaran lingkungan menjadi estafet yang terus-menerus dan cenderung semakin memprihatinkan akibat kurangnya kesadaran terhadap lingkungan, yang pada akhirnya bukan tidak mungkin mengakibatkan kerugian sepanjang masa, baik bagi kepentingan daerah ataupun masyarakat. Sungai Siak merupakan salah satu dari empat buah sungai besar yang ada di Provinsi Riau merupakan sungai yang terdalam di Indonesia dan bisa dilayari oleh kapal-kapal besar, banyaknya spesies ikan yang hidup di Sungai Siak sekarang sudah punah dan bahkan kedalamannya sudah menurun ini disebabkan oleh pencemaran yang terjadi di sepanjang sungai tersebut.

Salah satu penyebab permasalahan tercemarnya Sungai Siak adalah akibat limbah domestik, berupa plastik, sisa-sisa makanan dan kotoran manusia. Akan tetapi, selain limbah domestik yang dihasilkan oleh industri rumah tangga, limbah puskesmas (Pusat kesehatan masyarakat), rumah sakit, rumah makan, usaha kecil lainnya juga berpotensi besar terhadap tercemarnya Sungai Siak. Sedangkan untuk pelaku usaha seperti medis, rumah makan dan usaha lainnya yang berpotensi menghasilkan limbah agar menggunakan IPAL (Instalasi Pembuangan Limbah) sebelum membuang limbahnya ke Sungai Siak, namun pencemaran tetap berlangsung hingga sekarang, karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aktivitas humas BLH Provinsi Riau dalam menanggulangi tingkat pencemaran sungai Siak di Kota Pekanbaru.

Dalam melakukan penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam mengumpulkan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Subjek penelitian ini menggunakan pertimbangan *snowball sampling* (berkembang mengikuti informasi atau data yang diperlukan) sehingga memungkinkan melibatkan pihak di luar lokasi penelitian yang dipandang mengerti dan memahami penelitian ini yaitu 1(satu) orang humas BLH sebagai informan kunci (Key Informan) dan 4 (empat) orang kepala bidang pencemaran, 3 (tiga) orang masyarakat tempatan serta 2 (dua) orang LSM sebagai pakar dan ahli lingkungan, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah tingkat pencemaran sungai Siak di Kota Pekanbaru, untuk menganalisis data penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif, peneliti terlibat dalam melakukan perbandingan-perbandingan terhadap data yang telah dikumpulkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BLH Provinsi Riau dalam menanggulangi tingkat pencemaran Sungai Siak di Kota Pekanbaru telah melakukan tugas sebagaimana fungsinya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pemasangan papan larangan membuang sampah, pendekatan persuasif kepada masyarakat dan perusahaan, melakukan sistem kelola B3 dan rencana pembangunan septictank komunal, akan tetapi hal ini masih ada hambatan dan kendala yang terjadi seperti kurangnya fasilitas tong sampah, dan sulitnya merubah budaya masyarakat yang aktivitasnya lekat dengan sungai sehingga masih terjadi pencemaran dibantaran Sungai Siak.

## ABSTRAK

Kerusakan dan pencemaran lingkungan dalam periode beberapa dekade akhir-akhir ini menjadi perhatian dan sumber pengkajian yang tidak ada habis-habisnya. Hingga saat ini, pencemaran lingkungan menjadi estafet yang terus-menerus dan cenderung semakin memprihatinkan akibat kurangnya kesadaran terhadap lingkungan, yang pada akhirnya bukan tidak mungkin mengakibatkan kerugian sepanjang masa, baik bagi kepentingan daerah ataupun masyarakat. Sungai Siak merupakan salah satu dari empat buah sungai besar yang ada di Provinsi Riau merupakan sungai yang terdalam di Indonesia dan bisa dilayari oleh kapal-kapal besar, banyaknya spesies ikan yang hidup di Sungai Siak sekarang sudah punah dan bahkan kedalamannya sudah menurun ini disebabkan oleh pencemaran yang terjadi di sepanjang sungai tersebut.

Salah satu penyebab permasalahan tercemarnya Sungai Siak adalah akibat limbah domestik, berupa plastik, sisa-sisa makanan dan kotoran manusia. Akan tetapi, selain limbah domestik yang dihasilkan oleh industri rumah tangga, limbah puskesmas (Pusat kesehatan masyarakat), rumah sakit, rumah makan, usaha kecil lainnya juga berpotensi besar terhadap tercemarnya Sungai Siak, Sedangkan untuk pelaku usaha seperti medis, rumah makan dan usaha lain yang berpotensi menghasilkan limbah agar menggunakan IPAL (Instalasi Pembuangan Limbah) sebelum membuang limbahnya ke Sungai Siak, namun pencemaran tetap berlangsung hingga sekarang, karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aktivitas humas BLH Provinsi Riau dalam menanggulangi tingkat pencemaran sungai Siak di Kota Pekanbaru.

Dalam melakukan penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam mengumpulkan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Subjek penelitian ini menggunakan pertimbangan *snowball sampling* (berkembang mengikuti informasi atau data yang diperlukan) sehingga memungkinkan melibatkan pihak di luar lokasi penelitian yang dipandang mengerti dan memahami penelitian ini yaitu 1 (satu) orang humas BLH sebagai informan kunci (Key Informan) dan 4 (empat) orang kepala bidang pencemaran, 3 (tiga) orang masyarakat tempatan serta 2 (dua) orang LSM sebagai pakar dan ahli lingkungan, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah tingkat pencemaran sungai Siak di Kota Pekanbaru, untuk menganalisis data penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif, peneliti terlibat dalam melakukan perbandingan-perbandingan terhadap data yang telah dikumpulkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BLH Provinsi Riau dalam menanggulangi tingkat pencemaran Sungai Siak di Kota Pekanbaru telah melakukan tugas sebagaimana fungsinya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pemasangan papan larangan membuang sampah, pendekatan persuasif kepada masyarakat dan perusahaan, melakukan sistem kelola B3 dan rencana pembangunan septictank komunal, akan tetapi hal ini masih ada hambatan dan kendala yang terjadi seperti kurangnya fasilitas tong sampah, dan sulitnya merubah budaya masyarakat yang aktivitasnya lekat dengan sungai sehingga masih terjadi pencemaran dibantaran Sungai Siak.



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	6
C. Penegasan Istilah .....	6
D. Permasalahan .....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
F . Kerangka Teoritas.....	10
G . Konsep Operasional .....	22
H. Metode Penelitian .....	23
I. Sistematika Penulisan	
BAB II    GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....	27
A. Deskripsi BLH Provinsi Riau .....	27
B, Kedudukan BLH Provinsi Riau .....	27
B. Tugas Pokok BLH Provinsi Riau.....	28
C. Visi dan Misi BLH Provinsi Riau .....	28
D. Struktur Organisai BLH Provinsi Riau .....	34
BAB III    PENYAJIAN DATA .....	42

A.	Aktivitas Humas BLH Provinsi Riau Dalam Menanggulangi Tingkat Pencemaran Sungai Siak di Kota Pekanbaru.....	43
B.	Mobilitas Sosial Masyarakat di Bantaran Sungai Siak di Kota Pekanbaru.....	48
C.	Faktor Pendukung dan Faktor-faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Menanggulangi Pencemaran Sungai Siak di Kota Pekanbaru.....	57
BAB IV	ANALISIS DATA.....	64
A.	Aktivitas Humas BLH Provinsi Riau.....	64
B.	Faktor Pendukung dan Faktor-faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Menanggulangi Pencemaran Sungai Siak di Kota Pekanbaru.....	77
BAB V	PENUTUP .....	81
A.	Kesimpulan .....	81
B.	Saran .....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Masalah lingkungan hidup dewasa ini timbul karena kecerobohan manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kerusakan dan pencemaran lingkungan dalam periode beberapa dekade akhir-akhir ini menjadi perhatian dan sumber pengkajian yang tidak ada habis-habisnya, baik ditingkat regional, nasional maupun internasional, karena dapat dikatakan sebagai kekuatan yang mendesak untuk mengatur kehidupan umat manusia dalam kaitannya dengan kebutuhan sumber daya alam, dengan tetap menjaga kelanjutan dan kelestarian alam itu sendiri. Dua hal yang paling esensial dalam kaitannya dengan masalah pengelolaan lingkungan hidup, adalah timbulnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, terutama pencemaran dan perusakan sungai (Sudharsono, 1991: 15).

Sungai Siak, Sungai Kampar, Sungai Indragiri dan Sungai Rokan merupakan empat buah sungai besar yang terdapat di daerah Riau. Dimana sungai Siak merupakan salah satu dari empat buah sungai yang memiliki keistimewaan, antara lain; (1) kedalamannya cukup dalam, bahkan sungai Siak merupakan sungai yang terdalam di Indonesia, yaitu dengan kedalaman 20-30 meter (2) airnya berwarna kecoklat-coklatan yang menunjukkan bahwa sungai ini berada di daerah rawa-rawa, dan (3) ramai dilayari oleh kapal-kapal besar dan kecil karena kedalamannya memungkinkan untuk dilayari dan kurang lebih 200 kilometer dari muaranya terdapat pelabuhan Kota Pekanbaru.

Merujuk sejarahnya, dahulu Sungai Siak merupakan daerah penangkapan ikan sungai yang cukup potensial. Kala itu kondisi perairannya masih relatif subur dan usaha penangkapan ikan belum begitu banyak dilakukan. Namun dalam ukuran waktu sepuluh tahun terakhir, hasil perikanannya sudah jauh menurun, terutama diperairan yang berada di bagian hilir Kota Pekanbaru. Hal ini disebabkan Sungai Siak telah tercemar dari hulu sampai ke hilir Sungai Siak, sehingga banyak ikan-ikan disungai tersebut menjadi mati dan tidak hanya itu, diperkirakan sudah ada *species* ikan yang telah punah akibat tingkat pencemaran sungai yang terlalu tinggi diantaranya ikan langka yang punah adalah udang loreng, udang galah, patin kunyit, kelabau, tapah dan ikan tilan (Mulyadi, 2005: 41).

Dari perkembangan kualitas air, Sungai Siak merupakan sungai yang paling buruk di daerah riau. Kondisi ini terutama diakibatkan oleh tingginya aktivitas industri dan intensifnya penggunaan transportasi air. Inilah yang menyebabkan baku mutu air Sungai Siak melebihi baku mutu kualitas air ditetapkan. Sebagaimana hasil penelitian Lemlit UNRI pada tahun 2002, Suhu air berkisar 27,3-28,5 C, DHL berkisar 40.2-1.005 mmhos/cm, kekeruhan air berkisar 5.3-26.1 NTU, kandungan bahan tersuspensi berkisar 18.0-81.0 mg/l, BOD (Biologikal Oxygen Demand) dan COD (Chemical Oxygen Demand) dalam air Sungai Siak cenderung sangat tinggi (Mulyadi, 2005: 56).

Akibat tercemarnya Sungai Siak mengakibatkan tidak hanya jenis ikan saja yang menjadi terancam habitatnya, tetapi juga berdampak kepada masyarakat yang tinggal di sepanjang Sungai Siak. Sekitar 1,150 juta jiwa yang terdiri dari 4

(empat) kabupaten dan 1 (satu) kota menjadikan Sungai Siak menjadi sumber kehidupan. Dimana 4 (empat) kabupaten tersebut adalah Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis serta 1 (satu) kota tersebut adalah Kota Pekanbaru (Mulyadi, 2005:59).

Keberadaan masyarakat inilah yang menjadikan Sungai Siak mengemban fungsi yang kompleks, misalnya sebagai tempat MCK (mandi, cuci, kakus), serta menjadikan Sungai Siak sebagai tong sampah sehingga menyebabkan tingkat pencemaran lebih tinggi. Selain itu, hadirnya perusahaan-perusahaan di sekitar Sungai Siak yang kemudian mengeluarkan limbah yang dialirkan langsung ke sungai atau DAS (Daerah Aliran Sungai Siak) tanpa menggunakan IPAL (Instalasi Pembuangan Air Limbah) menambah tingkat pencemaran Sungai Siak semakin tercemar ([www.riau.com](http://www.riau.com), post it:30 april 2010).

Pencemaran sungai di Riau, bila dirunut terjadi sejak bomming industri yang menempati sepanjang DAS (Daerah Aliran Sungai) seperti DAS Siak dan DAS Kampar. Sejak itulah, eskalasi pencemaran terus meningkat hingga puncaknya pada 8 Juni 2004 yang lalu dimana lebih dari 1,5 ton ikan mati mengapung. Inilah catatan pencemaran terburuk yang pernah terjadi di sungai di Riau dalam lima tahun terakhir (Suhaimi, 2011: 4).

Peningkatan skala pencemaran ini pada dasarnya tidak lepas dari lemahnya penegakan hukum sebagai buah dari minusnya komitmen aparaturnegara dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan yang terkait dengan masalah. Minusnya perhatian masyarakat juga menjadi faktor yang merugikan. Walaupun pada

dasarnya, semua ini terjadi akibat tidak transparannya proses penyusunan dan implementasi kebijakan yang berkaitan dengan pencemaran ini. Dengan kondisi sedemikian rupa, perusahaan tidak lagi takut dalam melakukan pencemaran. Tentunya yang akan menerima dampak dari semua itu adalah masyarakat dimana industri tersebut berada (Samanda, 2004: 24).

Hingga saat ini, pencemaran lingkungan menjadi estafet yang terus-menerus dan cenderung semakin memprihatinkan akibat kurangnya kesadaran terhadap lingkungan, yang pada akhirnya bukan tidak mungkin mengakibatkan kerugian sepanjang masa, baik bagi kepentingan daerah ataupun masyarakat.

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan komponen lainnya kedalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya (pasal 1 butir 12 UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Berpijak pada analisa-analisa di atas, terlihat bahwa Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Riau belum memiliki perencanaan yang jelas mengenai strategi komunikasi dalam menanggulangi pencemaran lingkungan Sungai Siak. “Padahal pada dasarnya tujuan umum dari aktivitas humas adalah cara menciptakan hubungan harmonis antara perusahaan atau instansi yang diwakilinya dengan publiknya atau stakeholder sasaran yang terkait. Hasil yang diharapkan adalah terciptanya citra positif (*good image*), kemauan yang baik (*good will*), saling menghargai (*mutual appreciation*), saling timbul pengertian

(*mutual understanding*) , dan toleransi (*tolerance*) antara kedua belah pihak “ (Ruslan,1999: 33).

BLH Riau merupakan perangkat kerja Pemerintah Provinsi Riau yang bergerak dalam bidang pengendalian dampak lingkungan untuk wilayah Riau. Sehingga, BLH Riau seharusnya dapat menganalisa sejauh mana tingkat pencemaran di Riau. Dalam penelitian ini, penulis lebih menitik beratkan pada persoalan pencemaran lingkungan khusus pencemaran Sungai Siak yang memfokuskan penelitian di Kota Pekanbaru di mana aliran Sungai Siak berada.

Sepanjang Sungai Siak masyarakat Kota Pekanbaru yang tinggal di pinggiran Sungai Siak menjadikan sungai sebagai sumber aktivitas, dimana sungai dijadikan untuk melakukan aktivitas MCK (Mandi, Cuci, Kakus). Selain itu sungai tersebut juga dijadikan sebagai tong sampah yang sebagian besar masyarakat membuang sampah di sungai tersebut. Selain itu, berdirinya perusahaan-perusahaan di sepanjang Sungai Siak memberikan kontribusi besar terhadap semakin besarnya tingkat pencemaran (Wawancara dengan Drs. Arbaini, MT Kabid Pencemaran BLH Riau, 04 Desember 2011).

Sejauh ini strategi komunikasi yang di lakukan BLH Riau untuk mengurangi Pencemaran limbah di sungai Siak hanya berupa himbauan-himbauan tetapi belum melakukan tindakan konkrit untuk menekan lajunya tingkat pencemaran sungai Siak bahkan mengembalikan sungai Siak seperti semula bersih dan tidak terjangkit berbagai penyakit akibat limbah yang mengalir sepanjang sungai Siak.

Bertitik tolak dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Aktivitas Humas Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau dalam Menanggulangi Tingkat Pencemaran Sungai Siak di Kota Pekanbaru.”**

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Penulis mengadakan penelitian tentang **Aktivitas Humas Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau dalam Menanggulangi Tingkat Pencemaran Sungai Siak di Kota Pekanbaru.**” karena didasari atas beberapa alasan sebagai berikut:

1. Masalah pencemaran lingkungan terutama pencemaran Sungai Siak merupakan tanggung jawab kita bersama karena tingkat pencemaran Sungai Siak sudah sangat memprihatinkan dan penulis ingin lebih dalam lagi mengkaji masalah ini, humas BLH sangat berperan dalam hal ini terutama dalam melakukan kelestarian lingkungan di sekitar sungai tersebut
2. Untuk mengetahui lebih jelas aktivitas humas BLH dalam menanggulangi tingkat pencemaran Sungai Siak, karena telah terjadi kerusakan lingkungan di sepanjang sungai tersebut
3. Penulis melihat adanya kendala dalam menanggulangi tingkat pencemaran Sungai Siak
4. Dalam penulisan ini penulis merasa mampu untuk mengadakan penelitian, baik dari segi waktu, dana, lokasi dan aspek pendukung penelitian.

### **C. Penegasan Istilah**

Untuk mempermudah serta menghindari kasalahan-kesalahan dalam penafsiran serta pengertian dalam istilah atau kata-kata yang ada dalam fokus penelitian. Maka perlu dijelaskan mengenai hal tersebut yang nantinya akan dijadikan pegangan dalam penelitian ini.

1. **Aktivitas** adalah: kegiatan yang dilakukan oleh humas untuk menjalani fungsi-fungsi manajemen dalam sebuah instansi atau perusahaan (Ruslan, 2008: 26).
2. **Humas** adalah fungsi manajemen yang menilai sikap publik, menyatakan kebijaksanaan dan prosedur dari individu atau organisasi atas dasar kepentingan publik, dan melaksanakan program kerja untuk memperoleh pengertian dan pengakuan dari publiknya (Yulianita,2007:25).
3. **Badan Lingkungan Hidup (BLH)** adalah sebuah badan atau unit organisasi daerah yang mengkaji yang dibentuk pada tahun 1997 dengan peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 8 tahun 1997 sebagai pengembangan dari Biro Bina Lingkungan Hidup yang berada dibawah Sekretariat Daerah provinsi Riau
4. **Tingkat Pencemaran air** adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan komponen lainnya kedalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya (pasal 1 butir 12 UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup).
5. **Sungai Siak** adalah sungai yang terletak di provinsi Riau, Indonesia. Merupakan sungai terdalam di Indonesia, yang kedalamannya *dahulu*

mencapai 30 meter namun akibat pendangkalan kini tinggal sekitar 7-14 meter serta memiliki bentuk tampang melintang dengan bibir tebing yang curam (Mulyadi, 2005: 46).

#### **D. Permasalahan**

Dari uraian diatas maka dapat diidentifikasi beberapa hal yang meliputi identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah.

##### **1. Identifikasi masalah**

Identifikasi permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah Aktivitas Humas Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau dalam Menanggulangi Tingkat Pencemaran Sungai Siak di Kota Pekanbaru.
- b. Apa saja faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Aktivitas Humas Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau dalam Menanggulangi Tingkat Pencemaran Sungai Siak di Kota Pekanbaru.

##### **2. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah yang akan diteliti antara lain:

- a. Dalam penelitian ini penulis lebih menitik beratkan pada persoalan Aktivitas BLH dalam menanggulangi pencemaran lingkungan khususnya pencemaran Sungai Siak
- b. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan objek penelitian hanya di Kota Pekanbaru dimana aliran Sungai Siak berada

### 3. Rumusan masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan pada latar belakang di atas mengenai Aktivitas Humas Badan Lingkungan Hidup tentang pencemaran Sungai Siak, penulis kemudian merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah Aktivitas Humas Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau dalam Menanggulangi Tingkat Pencemaran Sungai Siak di Kota Pekanbaru.
- b. Apa faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Aktivitas Humas Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau dalam Menanggulangi Tingkat Pencemaran Sungai Siak di Kota Pekanbaru.

### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Aktivitas Humas Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau dalam Menanggulangi Tingkat Pencemaran Sungai Siak di Kota Pekanbaru.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Aktivitas Humas Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau dalam Menanggulangi Tingkat Pencemaran Sungai Siak di Kota Pekanbaru.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Akademis

- 1) Memberikan gambaran dan informasi kepada pihak-pihak terkait khususnya civitas akademik komunikasi mengenai realita tugas humas Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau dalam menanggulangi pencemaran lingkungan.
- 2) Bagi penulis, sebagai langkah awal untuk dapat mengembangkan teori-teori yang di dapat selama ini dan menambah khazanah ilmu komunikasi khususnya tentang kehumasan.

### b. Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai sumbangsih pemikiran kepada pihak Humas Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau untuk meningkatkan fungsi humas dalam menanggulangi pencemaran sungai terutama di Kota Pekanbaru.
- 2) Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan referensi bagi peneliti selanjutnya.

## **F. Kerangka Teoritis**

### **1. Humas**

Menurut J.C. Seidel *Public Relations atau Humas* adalah proses yang berkesinambungan dari usaha-usaha pihak manajemen untuk memperoleh sokongan (*goodwill*) dan pengertian dari pelanggan, pegawai atau karyawan dan publik pada umumnya. Ke dalam dengan melakukan analisa-analisa dari perbaikan-perbaikan terhadap diri sendiri, dan ke luar dengan mengadakan atau menyampaikan pernyataan-pernyataan (Rudy, 2005 : 7).

*Public Relations* adalah fungsi manajemen yang khas yang mendukung pembinaan dan pemeliharaan jalur bersama antara organisasi dengan publiknya mengenai komunikasi, pengertian, penerimaan dan kerjasama; yang melibatkan manajemen dalam permasalahan atau persoalan membantu manajemen menjadi tahu mengenai dan tanggap terhadap opini publik menetapkan dan menekankan tanggung jawab manajemen untuk melayani kepentingan publik; mendukung manajemen dalam mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif bertindak sebagai sistem peringatan dini dalam membantu mengantisipasi kecenderungan dan menggunakan penelitian serta teknik komunikasi yang sehat dan etis sebagai sarana utama” ( Effendy, 1993 : 117).

Public relations adalah keseluruhan kegiatan yang dijalankan oleh suatu organisasi terhadap pihak-pihak lain dalam rangka pembinaan pengertian dan memperoleh dukungan pihak lain demi tercapainya tujuan organisasi dengan baik. Dimana menurutnya lagi bahwa kegiatan public relations digolongkan menjadi dua golongan besar yaitu :

**a. Kegiatan Public Relations bersifat formal**

Golongan kegiatan ini dijalankan oleh pemimpin suatu organisasi yang dalam prakteknya sehari-hari diserahkan kepada biro/seksi humas (public relations). Pada hakekatnya kegiatan ini bersifat memberikan informasi kepada pihak luar tentang berbagai aspek kegiatan, seperti struktur organisasi kegiatan-kegiatan pokoknya dan hasil-hasil yang dicapai dapat dinikmati oleh masyarakat, serta pelaksanaan tanggung jawab social terhadap karyawan dan masyarakat luar serta hal-hal yang menguntungkan organisasi (Siagian, 1996: 96).

**b. Kegiatan Public Relations yang bersifat Informal**

Jika kegiatan-kegiatan Public Relations hanya dibatasi pada kegiatan formal saja, maka sangat disangsikan apakah masyarakat dan pihak-pihak luar lainnya sesungguhnya memperoleh gambaran yang setepat-tepatnya mengenai aktivitas organisasi, karena kegiatan Public Relations yang bersifat informasi memegang peranan penting bentuk utama kegiatan public relations yang bersifat informal adalah tindak tanduk, sikap serta tata laku anggota-anggota organisasi yang bersifat menjunjung tinggi nama baik organisasi.

Lima syarat penting Public Relations dalam organisasi yaitu :

- a. Penjabat Pulic Relations mempunyai informasi yang lengkap tentang organisasi

- b. Pucuk pimpinan operasional harus bertanggung jawab tentang public Relations
- c. Manajemen harus mendukung keputusan-keputusan oleh pejabat Public Relations
- d. Harus ada system Accountability terhadap performance dan pada pejabat Punlic Relations
- e. Kehumasan, harus lebih banyak memikirkan “objektifitas” jangka panjang dari pada “objektivitas” jangka pendek (Siswanto.1995:5).

## **1. Aktivitas Humas**

Aktivitas secara umum dapat diartikan sebagai kegiatan pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi pokok dalam system. Pada dasarnya aktivitas humas meliputi kegiatan mulai dari membenahan organisasi itu sendiri (*The PR begins at home*), hingga kegiatan yang bersifat membangun atau menciptakan citra perusahaan (*image building dan creatifity*) dan hubungan yang positif di mata publiknya (Ruslan, 2008: 12).

Peran komunikasi dalam suatu aktivitas manajemen perusahaan atau instansi biasanya dilaksanakan oleh pihak humas. Dengan peranan yang dilaksanakan tersebut, pejabat humas (*PRO Manager*) akan melakukan fungsi-fungsi manajemen perusahaan, yang secara garis besar aktivitas utamanya berperan sebagai berikut :

### **a. Communicator**

Artinya kemampuan sebagai komunikator baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui media cetak/elektronik dan lisan (*Spoke Person*) atau tatap muka dan sebagainya. Disamping itu juga bertindak sebagai mediator dan sekaligus persuader.

*b. Relationship*

Kemampuan humas untuk membangun hubungan yang positif antara lembaga yang diwakilinya dengan public internal dan eksternal. Juga berupaya menciptakan hubungan saling pengertian, kepercayaan, dukungan, kerja sama dan toleransi antara kedua belah pihak tersebut.

*c. Back up Management*

Melaksanakan dukungan manajemen atau menunjang kegiatan lain seperti manajemen promosi, pemasaran, operasional, personalia, dan sebagainya untuk mencapai tujuan pokok perusahaan.

*d. Good Image Maker*

Menciptakan citra atau publikasi yang positif merupakan prestasi, reputasi dan sekaligus menjadi tujuan utama bagi aktivitas humas dalam melaksanakan manajemen kehumasan yaitu membangun citra atau nama baik lembaga/organisasi dan produk yang diwakilinya. Dengan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya diharapkan humas tidak hanya mampu membangun citra identitas perusahaan, tetapi juga mampu menghadapi krisis (*Facing of Crisis*) termasuk menghadapi keluhan-keluhan dari

pelanggan. Selain itu, aktivitas yang harus dilakukan humas suatu perusahaan atau instansi adalah menyelenggarakan komunikasi timbal balik *two way communication* (Ruslan, 2008: 26).

Proses perencanaan program kerja melalui proses empat tahapan atau langkah-langkah pokok yang menjadi acuan untuk pelaksanaan program kerja kehumasan adalah sebagai berikut:

a. Penelitian dan mendengarkan (*Research –Listening*)

Dalam tahap ini, penelitian yang dilakukan berkaitan dengan opini, sikap dan reaksi dari mereka yang berkepentingan dengan aksi dan kebijaksanaan-kebijaksanaan suatu organisasi. Setelah itu baru dilakukan pengevaluasian fakta-fakta, dan informasi yang masuk untuk penentuan keputusan berikutnya. Pada tahap ini akan ditetapkan suatu fakta dan informasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan organisasi yaitu, *What's our problem* ?( apa yang menjadi masalah kita).

b. Perencanaan dan mengambil keputusan (*Planing –Decision*)

Berdasarkan fakta-fakta atau data dari humas membuat rencana tentang apa yang harus dilakukan dalam menghadapi problema-problema itu. Untuk menghindari kegagalan-kegagalan dalam melaksanakan tugasnya dan memperoleh hasil yang diharapkan, maka komunikasi itu harus well-planned disamping memikirkan anggaran yang dipelakukan.

c. Mengkomunikasi dan Pelaksanaan ( *Communication Action* )

Setelah rencana itu disusun dengan sebaik-baiknya sebagai hasil pemikiran yang mantap atau matang berdasarkan fakta-fakta atau data yang telah dikumpulkannya, humas kemudian melakukan operasinya

d. Mengevaluasi ( *Evaluation* )

Mengadakan evaluasi tentang sesuatu kegiatan adalah perlu untuk menilai apakah tujuan itu sudah tercapai, apakah perlu diadakan lagi “operasi” atau menggunakan cara-cara lain untuk mendapatkan hasil yang lebih baik (Cutlip dan Center, 1999: 148).

Membicarakan mengenai bentuk kegiatan humas pada prakteknya, humas itu sifatnya berdiri sendiri merupakan salah satu bagian dari bentuk organisasi fungsional dalam suatu perusahaan tertentu. Pengertian organisasi fungsional itu adalah organisasi yang direncanakan dan disusun berdasarkan sifat dan jenis fungsi yang harus dilaksanakan (Djaja, 1985:23).

Tujuan dari humas itu bukan lagi hanya memberikan suatu pesan komunikasi yang bersifat informatif dan persuasif, akan tetapi juga harus dapat menciptakan hubungan yang harmonis diantara public yang berkepentingan (Djaja, 1985:25).

Pengertian hubungan yang harmonis dalam membicarakan masalah bentuk kegiatan atau aktivitas humas mencakup kepada arti

- a. Humas harus mampu menciptakan kerjasama di antara publik yang mempunyai kepentingan

- b. Humas harus dapat menumbuhkan saling pengertian di antara public yang mempunyai kepentingan
- c. Humas harus dapat menciptakan tumbuhnya rasa kepuasan bersama di antara publik yang berkepentingan

Menurut Djaja (1985:25) adapun aktivitas atau ruang lingkup tugas humas dalam membina hubungan yang harmonis dengan publik terbagi atas dua hal yaitu membina hubungan ke dalam (publik internal) dan membina hubungan ke luar (publik eksternal).

### **3. Pencemaran Sungai**

Telah disadari bahwa kemajuan industri dan teknologi yang mampu meningkatkan kesejahteraan manusia itu ternyata juga menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan yang pada akhirnya juga berdampak terhadap manusia. Oleh karena itu penerapan kemajuan industri dan teknologi tersebut harus ditinjau kembali. Harus dipikirkan kembali agar penerapan kemajuan industri dan teknologi tersebut dapat memberikan hasil dan manfaat yang lebih baik bagi kelangsungan hidup manusia (wardhana, 2001: 12) .

Sejauh ini dapat diketahui bahwa sungai mempunyai kemampuan mengabsorpsi limbah yang dibuang ke dalamnya. Kemampuan ini tidak terbatas, tetapi apabila jumlah dan kualitas limbah yang dibuang ke dalam Sungai melampaui kemampuannya untuk mengabsorpsi dan mengganggu fungsinya, maka dikatakan bahwa lingkungan itu telah terjadi pencemaran lingkungan dan pencemaran Sungai ( Suparni, 1992: 19).

Dikatakan oleh Munadjat Danusaputro bahwa “Masalah pencemaran adalah hanya suatu masalah lingkungan yang lebih mendasar, yaitu dalam hal cara pengelolaan lingkungan hidup yang tidak terencana dan tidak terpadu (Danusaputro, 1980: 25).

Hal ini harus disadari, bahwa pencemaran dapat mengakibatkan kualitas lingkungan menurun akan menjadi fatal apabila pencemaran tidak ditanggulangi sedini mungkin”.

Dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pencemaran Sungai tersebut sebagai berikut :

- a. Masuknya atau dimasukkan makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lainnya kedalam lingkungan.
- b. Perubahan tatanan Air
- c. Dilakukan oleh kegiatan manusia atau oleh proses dari alam.
- d. Menimbulkan akibat “Kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

#### **4. Penanggulangan dan Pola Pengelolaan Pencemaran Sungai**

Pendekatan menyeluruh perencanaan pengelolaan sumberdaya perlu mempertimbangkan bahwa terganggunya salah satu komponen pada sistem. Pendekatan menyeluruh tersebut pada hakekatnya adalah suatu kajian terpadu terhadap keseluruhan aspek pada sumberdaya dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan, sosial, politik, dan ekonomi. Untuk dapat melakukan

perencanaan dan penanggulangan pengelolaan daerah aliran sungai dapat dimanfaatkan sebagai satu unit perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang sistematis, logis, dan rasional. Perencanaan pengelolaan daerah aliran sungai secara menyeluruh diharapkan dapat memberikan manfaat secara multiguna kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Prinsip-prinsip perencanaan penanggulangan dan pengelolaan daerah aliran sungai adalah :

- a. Tujuan atau sasaran utama pengelolaan daerah aliran sungai secara menyeluruh harus dirumuskan secara jelas dengan disertai mekanisme sistem pemantauan dan evaluasi secara periodic.
- b. Perlu disiapkan mekanisme administrasi yang efisien dengan fokus perhatian pada aspek-aspek sosial, ekonomi dan kerjasama yang harmonis antara lembaga-lembaga (pemerintahan dan non pemerintahan).
- c. Pengelolaan daerah aliran sungai diarahkan pada penyelesaian konflik yang muncul diantara pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan (Asdak, 2010: 558).

Penanggulangan dan pengelolaan pencemaran air melalui pendekatan ekosistem secara umum bersifat:

- a. Menjelaskan bagaimana komponen-komponen suatu system lingkungan hidup
- b. Penanggulangan dan pengelolaan bersifat holistic, komprehensif, serta menjelaskan dinamika system.

- c. Membatasi ekosistem secara alamiah
- d. Berorientasi pada prinsip-prinsip pengelolaan serta memasukkan dan mempertimbangkan dinamika factor-faktor manusia dan kelembagaan dalam proses analisis.
- e. Memanfaatkan proses-proses perencanaan dan penelitian yang antisipatif, lentur dan adaptif (Asdak, 2007: 67).

## **5. Tujuan Penanggulangan dan Pengelolaan Pencemaran Daerah Aliran Sungai**

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan pengelolaan sumberdaya alam dapat pulih (renewable resources) seperti vegetasi, tanah dan Sungai air dalam suatu daerah aliran sungai dengan tujuan untuk menghasilkan produk air (*water yield*) untuk kepentingan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perindustrian, irigasi, tenaga listrik, rekreasi dan air minum masyarakat (Manan: 1979, 36).

Tujuan akhir yang ingin dicapai dari pengelolaan daerah aliran Sungai adalah agar daerah aliran Sungai secara keseluruhan dapat berperan atau memberikan manfaat sebesar-besarnya secara lestari bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan (Soeranggajiwa: 1978, 19).

Untuk mewujudkan tujuan pengelolaan DAS dengan sebaik-baiknya, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Aspek fisik teknis, yaitu pengelolaan tata guna lahan sebagai prakondisi dalam mengusahakan dan menerapkan teknik-teknik perlakuan atas sumber daya alam daerah aliran sungai yang akan memberikan hasil dan manfaat yang maksimal dan sumber daya alam didalamnya dapat dipertahankan
- b. Aspek manusia, yaitu mengusahakan adanya pengertian, kesadaran, sikap, dan kemampuan agar tindakan dan pengaruh terhadap sumber daya alam yang ada.
- c. Aspek Institusi, yaitu menggerakkan aparatur sehingga struktur dan prosedurnya dapat mewadahi penyelenggaraan pengelolaan DAS secara efektif dan efisien.
- d. Aspek Hukum, yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur segala sesuatu bagi kemantapan hukum dalam menyelenggarakan pengelolaan DAS (Mustari: 1985, 58).

## **6. Hambatan dan Kendala Penanggulangan Pengelolaan Daerah aliran sungai**

Hambatan dan penanggulangan pencemaran Sungai :

- a. Kesadaran Masyarakat Masih Rendah

Kendala ini sangat terasa disamping penerangan dan penyuluhan oleh Instansi dan organisai secara luas, untuk menghilangkan kendala/hambatan tersebut diperlukan metode khusus dan penyuluhan terpadu yang harus disampaikan kepada masyarakat.

b. Peraturan Hukum Lingkungan belum Lengkap

Undang-undang tentang ketentuan pokok Pengelolaan lingkungan Hidup belum dilengkapi seluruhnya dengan peraturan pelaksanaan sehingga sebagai kaderwet belum dapat difungsi secara maksimal.

c. Para Penegak Hukum Belum Profesional

Belum dapat dikatakan para penegak hukum sudah mengetahui seluk beluk hukum lingkungan, bahkan mungkin pengenalan hukum (*law acquaintance*) Lingkungan pun masih kurang .

d. Masalah Pembiayaan

Penanggulangan masalah pencemaran daerah aliran sungai memerlukan biaya yang sangat besar disamping penguasaan teknologi dan manajemen serta instrument yang merupakan alat untuk mempertahankannya (Hamzah,2005: 64).

## **G. Konsep Operasional**

Berdasarkan kerangka teoritas yang peneliti bangun untuk penelitian ini, sangat penting bagi peneliti untuk menyusun sebuah konsep operasional guna untuk memberikan penjelasan pada konsep teori. Pada operasional konsep teori diatas, aktivitas humas Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau dalam menanggulangi tingkat pencemaran Sungai siak pekanbaru.

Indikator Aktifitas Humas BLH dalam menanggulangi Pencemaran Sungai Siak adalah sebagai berikut :

- a. Humas Badan Lingkungan Hidup memberikan penyuluhan (sosialisasi) bidang lingkungan dan hukum kepada masyarakat yang berdomisili di bantaran Sungai Siak Kota Pekanbaru, dan para pelaku industri yang berpotensi menyebabkan terjadi pencemaran.
- b. Humas Badan Lingkungan Hidup Melakukan kerjasama dalam penanggulangan pencemaran dengan badan penegak hukum dan Lembaga Swadaya masyarakat (LSM).
- c. Humas Badan Lingkungan Hidup Survei langsung setiap bulan sekali yang ditangani oleh Badan Lingkungan Hidup
- d. Humas Badan Lingkungan Hidup memberikan dan meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam melestarikan keutuhan sungai.
- e. Humas Badan Lingkungan Hidup selalu berbenah diri dan meningkatkan kapasitas kelembagaan yang terkait.
- f. Humas Badan Lingkungan Hidup melakukan pengelolaan tata gulan dan tata air yang berkelanjutan.

## **H. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata

tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai dari sesuatu keutuhan (Moleong, 2005: 4).

## **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau (BLH) Jl. Thamrin No.93 Pekanbaru.

## **2. Subjek Dan Objek Penelitian**

### **a. Subjek**

Penentuan subjek maupun informan penelitian menggunakan pertimbangan *snowball sampling* (berkembang mengikuti informasi atau data yang diperlukan) sehingga memungkinkan melibatkan pihak di luar lokasi penelitian yang dipandang mengerti dan memahami kehidupan individu-individu sebagai anggota masyarakat lokasi penelitian (Bungin, 2011: 144)

Subjek penelitian ini adalah 1 orang Kepala Humas Badan Lingkungan Hidup, 4 orang Kabid Bidang Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau, penduduk di sekitar bantaran sungai Siak Kota Pekanbaru serta melibatkan LSM yang ada.

b. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah aktivitas humas badan lingkungan hidup Provinsi Riau dalam menanggulangi tingkat pencemaran Sungai Siak di Kota Pekanbaru

**3. Sumber Data**

Berkenan dengan tujuan penelitian kualitatif, maka dalam prosedur penelitian sampling yang terpenting adalah bagaimana menentukan informan kunci (key informan) dengan kriteria tertentu (Bungin, 2010: 53)

Pengumpulan data dilakukan sebanyak mungkin dengan melibatkan informan yang dapat memberikan informasi, 1 orang informan kunci (key informan) adalah kepala bidang Humas BLH Provinsi Riau, 4 orang Kabid BLH yang dianggap perlu, 3 orang masyarakat yang bermukim di bantaran Sungai Siak dengan pertimbangan masyarakat tempatan asli yang tinggal cukup lama, serta melibatkan 2 Direktur LSM dengan pertimbangan pakar dan ahli dengan lingkungan hidup.

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan unsur atau elemen yang menjadi obyek penelitian (Rakhmat, 2001: 78). Maka populasi dalam penelitian ini adalah staf badan lingkungan hidup Provinsi Riau, masyarakat dan LSM Lingkungan.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai representatif atau wakil populasi yang bersangkutan (Rakhmat, 2001: 81). 1 orang Informan Kunci (Key informan) adalah Kasubag Humas BLH Provinsi Riau 4 orang BLH, 3 orang masyarakat dan 2 orang LSM yang terkait.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Observasi**

Observasi adalah suatu bentuk observasi khusus dimana peneliti tidak hanya jadi pengamat pasif, melainkan juga mengambil berbagai peran dalam situasi tertentu dan berpartisipasi dalam peristiwa-peristiwa yang akan diteliti (Bungin, 2011: 78).

##### **b. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Bungin, 2011: 100).

##### **c. Dokumentasi**

Pengambilan data pada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini, dengan memotrek kejadian-kejadin yang ada, serta meninjau arsip dokumentasi yang ada di kantor BLH Provinsi Riau.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penyajian analisis secara deskriptif. Penelitian ini berusaha untuk

mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan data yang ada, dan menganalisa objek yang akan diteliti dengan merujuk ada prosedur-prosedur riset yang menghasilkan data kualitatif, deskriptif diartikan melukiskan variabel, satu demi satu. Penelitian deskriptif hanya memaparkan situasi atau peristiwa. Peneliti tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi (Rakhmat, 2001 : 25).

## **I. Sistematika Tulisan**

BAB I : PENDAHULUAN, terdiri dari Latar Belakang, Alasan Pemilihan Judul, Penegasan Istilah, Permasalahan, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

BAB III : PENYAJIAN DATA terdiri Aktivitas Humas Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau dalam Menanggulangi Tingkat Pencemaran Sungai Siak di Kota Pekanbaru, faktor pendukung dan penghambat Aktivitas Humas Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau dalam Menanggulangi Tingkat Pencemaran Sungai Siak di Kota Pekanbaru..

BAB IV : ANALISA DATA Aktivitas Humas Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau dalam Menanggulangi Tingkat Pencemaran Sungai

Siak di Kota Pekanbaru, faktor pendukung dan penghambat Aktivitas Humas Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau dalam Menanggulangi Tingkat Pencemaran Sungai Siak di Kota Pekanbaru.

BAB V : PENUTUP, terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi BLH (Badan Lingkungan Hidup) Provinsi Riau**

Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau yang selanjutnya disebut BLH Provinsi Riau adalah salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk pada tahun 1997 dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 tahun 1997 sebagai pengembangan dan Biro Bina Lingkungan Hidup yang berada dibawah Sekretariat Provinsi Riau

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dikenal dengan era otonomi daerah, pada tahun 2001 Struktur Organisasi BLH mengalami perubahan dan penyesuaian lebih lanjut yang diatur melalui Perda Nomor 32 tahun 2001, tentang Struktur Organisasi dan tata kerja BLH Provinsi riau.

#### **B. Kedudukan BLH (Badan Lingkungan Hidup)**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau, kedudukan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau adalah unsur penunjang tugas tertentu Pemerintah Provinsi Riau yang dipimpin oleh

seorang kepala badan dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.

### C. Tugas Pokok BLH (Badan Lingkungan Hidup)

Tugas pokok Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan **kebijakan daerah bidang lingkungan hidup** dan dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan **wewenang** yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada gubernur selaku wakil pemerintah dalam rangka **dekonsentrasi**.

### D. Visi dan Misi BLH (Badan Lingkungan Hidup)

#### 1. Visi

Berdasarkan tahapan-tahapan diatas dapat diketahui bahwa ada **tiga kata kunci** yang bisa digunakan untuk merumuskan visi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau yaitu *lingkungan hidup*, *pelestarian fungsi lingkungan hidup* dan *pengelolaan lingkungan hidup*. Ketiga kata kunci ini memiliki hubungan yang erat.

Ekonomi yang mapan merupakan salah satu aspek yang akan diwujudkan didalam visi antara Provinsi Riau. Salah satu pilar utama dalam mewujudkan ekonomi yang mapan adalah lingkungan hidup yang memiliki fungsi ekonomi, sosial dan ekologi.

Oleh karena lingkungan hidup berperan penting dalam mewujudkan visi antara maka fungsi lingkungan hidup ini haruslah dilestarikan. Untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, dibutuhkan suatu cara yaitu melalui pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup adalah melestarikan fungsi lingkungan hidup mengingat definisi pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk **melestarikan fungsi lingkungan hidup** yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Dengan demikian, Visi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau yang ingin diwujudkan adalah :

***” Terwujudnya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup  
Melalui Pengelolaan Lingkungan Hidup”***

**2. MISI**

Misi (*mission*) merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Misi juga bisa berarti cara dan upaya umum serta bersifat pokok yang akan dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau dalam rangka mewujudkan dan merealisasikan visi yang telah ditetapkan.

Penentuan misi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau dilakukan dengan menjadikan misi lingkungan hidup yang ditetapkan di dalam RPJMD Riau 2009-2013 sebagai misi utama. Selain misi ini, dipandang perlu juga membuat misi

lain. Hal yang membedakan antara misi utama (misi nomor 1) dengan yang lainnya adalah misi ini memiliki paling banyak sasaran yang harus dicapai.

Sejalan dengan hal tersebut maka misi yang harus dijalankan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau adalah :

**a. Meningkatkan Kualitas Lingkungan dan Perlindungan Lingkungan**

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi maka pemerintah berupaya keras mendorong percepatan pembangunan dan mendorong pemanfaatan sumber daya alam serta investasi dunia usaha di daerah.

Upaya tersebut memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang sangat besar bagi kesejahteraan rakyat, namun disisi lain juga telah memberikan tekanan terhadap lingkungan yang pada akhirnya berujung pada munculnya berbagai macam pencemaran dan kerusakan lingkungan seperti pencemaran air, polusi asap, kerusakan tanah akibat produksi biomassa, kerusakan ekosistem gambut dan pesisir, kebakaran hutan dan lahan dan sebagainya.

Hal ini akan menurunkan kualitas lingkungan. Dalam kondisi seperti ini, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau akan memainkan peran yang sangat strategis yaitu meningkatkan kualitas lingkungan dan perlindungan lingkungan agar lingkungan hidup yang sehat, nyaman dan produktif dapat diwujudkan.

## **b. Mewujudkan Pengelolaan Informasi Lingkungan Hidup yang Berkualitas**

Kompleksitas dan eskalasi permasalahan lingkungan hidup di Provinsi Riau dalam dekade terakhir ini semakin meningkat. Kondisi ini akhirnya berimplikasi pada semakin besarnya tantangan dan ancaman yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Salah satu tugas yang harus dijalankan adalah mewujudkan pengelolaan informasi lingkungan hidup yang berkualitas. **Berkualitas** disini diartikan bahwa informasi lingkungan hidup yang dikelola bersifat *akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat luas atau publik.*

Dengan demikian, *pengetahuan dan wawasan masyarakat luas mengenai lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dapat ditingkatkan.* Hal ini secara tidak langsung akan mempengaruhi sikap dan perilaku publik (*public attitude and behaviour*) sehingga publik akan lebih mencintai lingkungan hidup dan lebih mendukung upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Upaya lain yang juga perlu dilaksanakan adalah **sinkronisasi dan koordinasi** antar instansi pemerintah. Proses sinkronisasi dan koordinasi ini nantinya akan membentuk sinergi di daerah yang memiliki kesamaan pandangan, komitmen dan derap langkah dalam mewujudkan perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup serta menjadi wahana pertukaran informasi lingkungan hidup yang efektif antar instansi.

Proses inilah nantinya yang akan menjadi media bagi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau dalam mengarusutamakan (*mainstreaming*) prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang berwawasan lingkungan.

**c. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**

Misi ketiga Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam agar *kelestarian sumber daya alam hayati dan non hayati dapat terjaga*.

Peran masyarakat tersebut dapat berbentuk pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, laporan dan informasi kepada pemerintah terkait dengan permasalahan lingkungan hidup. Ada berbagai alasan mengapa peran masyarakat diperlukan, antara lain terkadang masyarakat justru yang memberikan tekanan dan ancaman terhadap keberlanjutan lingkungan hidup.

Alasan lain adalah masyarakat bisa menjadi ujung tombak di lapangan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga tugas Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau akan terbantu.

Untuk itu, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau harus melakukan upaya pendekatan kepada masyarakat (*community approach*) dalam rangka mengajak mereka berperan serta dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam khususnya masyarakat yang bermukim di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan, masyarakat yang memanfaatkan lahan gambut, masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir serta masyarakat yang berdiam di daerah penyangga atau berbatasan/berdekatan dengan kawasan-kawasan konservasi.

**d. Mewujudkan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan secara Terpadu dan Efektif dalam rangka Mengendalikan Perubahan Iklim**

Persoalan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi mendapatkan perhatian tersendiri karena kebakaran hutan dan lahan ini merupakan persoalan tahunan dan telah menimbulkan asap yang berdampak secara regional di kawasan Asia Tenggara.

Kebakaran hutan dan lahan juga menimbulkan dampak global seperti efek rumah kaca (*green house effect*), pemanasan global (*global warming*) dan perubahan iklim (*climate change*). Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan.

Namun demikian, kebakaran hutan dan lahan tetap terjadi setiap tahunnya walaupun dengan frekuensi dan intensitas yang berbeda. Dalam konteks inilah, pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara terpadu dan efektif perlu dilakukan agar kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat diturunkan secara signifikan.

## **E. Struktur Organisasi BLH (Badan Lingkungan Hidup)**

Struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau, dipimpin oleh seorang **Kepala Badan** dengan membawahi 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang dengan rincian:

1. **Sekretariat** yang dipimpin oleh seorang sekretaris dengan tugas pokok dan fungsi sesuai Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau sebagai berikut:

**Tugas Pokok :** menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan administrasi, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kehumasan, protokol, keamanan dan bina program serta tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### **Fungsi:**

- a. Melaksanakan penyusunan rencana program, anggaran, kepegawaian, umum, kehumasan, protokol keamanan dan dan perlengkapan;
- b. Melaksanakan kegiatan rencana program, anggaran, kepegawaian, umum, kehumasan, protokol keamanan dan perlengkapan;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan rencana program, anggaran, kepegawaian, umum, kehumasan, protokol keamanan dan perlengkapan;

- d. Melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan analisis beban kerja analisis jabatan, budaya kerja, hukum kelembagaan dan ketatalaksanaan Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana.
- e. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

**Sub Bagian yang Dipimpin:**

- a. Sub Bagian Bina Program
- b. **Sub Bagian Umum dan Kehumasan**

Ditempatkan Humas kedalam sub Bagian Umum dan Humas mempunyai tugas atau deskripsi jabatan yang ditentukan oleh instansi. Aktivitas Humas Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau ditentukan berdasarkan pada tugas dan deskripsi jabatan Sub bagian Umum dan Kehumasan uraian tugas dan deskripsi jabatan tersebut (Sumber: Arsip BLH Provinsi Riau)

**Tugas Rutin/Harian:**

- a. Menyelesaikan tugas-tugas administrasi harian
  - 1) Menyusun rencana kerja harian berdasarkan prioritas yang ada
  - 2) Membaca dan mereview surat-surat yang masuk dan keluar dari dan ke instansi lain
  - 3) Membuat surat menyurat sesuai dengan urgensi baik ke daerah maupun ke kantor pusat
- b. Membantu pelaksanaan tugas pegawai
  - 1) Memantau kehadiran kerja pegawai

- 2) Membicarakan hasil kinerja
- 3) Memberikan pengarahan kepada bawahan untuk perbaikan kinerja

**Tugas Berkala :**

- a. Menyiapkan rencana anggaran & program kerja
  - 1) Membuat draft RAKP untuk didiskusikan dengan sekretaris dan pimpinan
  - 2) Mengkosultasikan dan menyerahkan draft RAKP dengan kepala cabang
- b. Mendistribusikan sarana kehumasan dan kerja serta himbauan yang berwawasan lingkungan
  - 1) Surat Kabar dan Majalah
  - 2) Sarana kehumasan seperti paflet, brosur, profil Instansi, annual report, banner, poster dan stiker
  - 3) Majalah dinding beserta materi kehumasan sesuai program, terutama program humas dalam penyelamatan lingkungan hidup
- c. Menyusun jadwal kegiatan penyuluhan kepada masyarakat dan perusahaan
  - 1) Menyiapkan sarana dan fasilitas yang dibutuhkan dalam kegiatan penyuluhan
  - 2) Melakukan kegiatan penyuluhan yang telah ditentukan

- 3) Melaporkan hasil kegiatan
  - 4) Melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan
  - 5) Mengadakan dan mengagendakan bersih lingkungan
- d. Mengadakan dan menjalin kerjasama dengan pihak lain

#### MOU

e. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

2. **Bidang Konservasi dan Perubahan Iklim** yang dipimpin oleh seorang kepala bidang dengan tugas pokok dan fungsi sesuai Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau sebagai berikut:

**Tugas Pokok:** menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan koordinasi dan pelaksanaan dalam perencanaan, pengendalian, pembinaan, pemantauan dan pengawasan kebijakan, program dan kegiatan konservasi keanekaragaman hayati, perubahan iklim dan perlindungan atmosfer serta tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### **Fungsi :**

- a. Penyusunan bahan kebijakan konservasi keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim dan perlindungan atmosfer.
- b. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang konservasi keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim dan perlindungan atmosfer.
- c. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Sub Bidang yang Dipimpin:**

- a. Sub Bidang Konservasi Keanekaragamanhayati
- b. Sub Bidang Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfir

3. **Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan** yang dipimpin oleh seorang kepala bidang dengan tugas pokok dan fungsi sesuai Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau sebagai berikut:

**Tugas Pokok:** menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan koordinasi dan pelaksanaan dalam perencanaan, pengendalian, pembinaan, pemantauan dan pengawasan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan akibat perbuatan manusia maupun alam serta tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

**Fungsi :**

- a. Penyusunan bahan kebijakan pengendalian kerusakan lingkungan ekosistem darat, pesisir dan laut.
- b. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang ekosistem darat, pesisir dan laut.

**Sub Bidang yang Dipimpin:**

- a. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Ekosistem Darat
- b. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut

4. **Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan** yang dipimpin oleh seorang kepala bidang dengan tugas pokok dan fungsi sesuai Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau sebagai berikut:

**Tugas Pokok:** menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan koordinasi dan pelaksanaan dalam perencanaan, pengendalian, pembinaan, pemantauan dan pengawasan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan akibat perbuatan manusia maupun alam serta tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

**Fungsi:**

- a. Penyusunan bahan kebijakan pengendalian pencemaran tanah, air dan udara serta pengelolaan limbah B3 dan domestik;
- b. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pencemaran tanah, air dan udara serta pengelolaan limbah B3 dan domestik.

**Sub Bidang yang Dipimpin:**

- a. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Tanah, Air dan Udara
- b. Sub Bidang Pengendalian Limbah B3 Padat dan Domestik

**Bidang Penataan dan Penekatan Lingkungan** yang dipimpin oleh seorang kepala bidang dengan tugas pokok dan fungsi sesuai Peraturan Gubernur

Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau sebagai berikut:

**Tugas Pokok:** menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan koordinasi dan pelaksanaan dalam perencanaan, pengendalian, pembinaan, pemantauan dan pengawasan kebijakan, program dan kegiatan penataan serta tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

**Fungsi:**

- a. Penyusunan bahan kebijakan kajian dampak lingkungan dan pengembangan kapasitas serta pembinaan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan.
- b. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kajian dampak lingkungan dan pengembangan kapasitas serta pembinaan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan.

**Sub Bidang yang Dipimpin:**

- a. Sub Bidang Kajian Dampak Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan
- b. Sub Bidang Pembinaan Lingkungan dan Penegakan Hukum

### **BAB III**

## **PENYAJIAN DATA**

Penyajian data berikut ini berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilaksanakan di BLH Provinsi Riau dan diwaktu penulis meninjau langsung sepanjang bantaran Sungai Siak di Kota Pekanbaru, Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data tentang Aktivitas Humas BLH Provinsi Riau dalam menanggulangi tingkat pencemaran sungai Siak di Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan sesuai dengan apa yang telah penulis uraikan sebelumnya pada bab pendahuluan yaitu dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

Wawancara dilakukan dengan cara komunikasi langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan Kepala Sub Bagian umum dan Humas, dan bidang Pencemaran BLH Provinsi Riau.

Observasi yang penulis lakukan dengan mengamati secara langsung aktifitas Humas BLH Provinsi Riau serta mengamati kliping yang dijadikan arsip instansi dan penulis mengamati langsung keadaan di bantaran sungai Siak, terutama tentang aktivitas masyarakat juga pengamatan terhadap aktivitas humas BLH yang Provinsi Riau di lapangan dalam menanggulangi tingkat pencemaran yang terjadi. Dokumentasi adalah salah satu teknik pengambilan data yang penulis gunakan sebagai data pelengkap yang diambil dari dokumen-dokumen perusahaan

atau organisasi, yang dapat menambah kekuatan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.

**A. Aktivitas Humas Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau Dalam Menanggulangi Tingkat Pencemaran Sungai Siak Di Kota Pekanbaru**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Zulfikar, M.Si (Sub Bagian Humas) mengenai aktivitas humas dalam menanggulangi tingkat pencemaran sungai Siak :

”... Didalam roda pemerintahan BLH Provinsi Riau humas sebagai divisi yang melakukan kontak langsung dengan masyarakat, peranan dan pelaksanaan aktivitas humas BLH mengenai penanggulangan pencemaran sungai Siak adalah sebuah tanggung jawab kami terutama humas dan kabid bagian pencemaran BLH, dimana seluruh aktivitas pencemaran sungai di Riau menjadi tanggungjawab kami, terutama sungai Siak ...” (Wawancara dengan Zulfikar, M.Si, Kasubag humas BLH, 04 Desember 2011).

Sesuai dengan fungsi dan tugasnya untuk menanggulangi pencemaran-pencemaran sungai khususnya sungai Siak maka dapat dikatakan sebagai tugas dan aktivitas humas adalah melakukan kontak kepada masyarakat untuk melakukan himbauan berupa sosialisasi-sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat tentang kelestarian Sungai Siak di Kota Pekanbaru pada khususnya dan Provinsi Riau pada umumnya.

Kedudukan Kabid Pencemaran di Provinsi Riau merupakan tugas yang sangat strategis dimana Kabid Pencemaran ini harus mampu menjalin hubungan dengan BLH Di Kota/ Kabupaten terutama dikawasan aliran sungai siak, hubungan ini harus terus terkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten atau Kota sebab aliran sungai siak ini saling berpengaruh. Maka dari itu komando yang bertanggungjawab penuh terhadap kelestarian sungai Siak berada di tangan BLH

Riau yang dijalankan oleh Kabid Pencemaran, Berikut wawancara dengan Drs.

Arbaini, MT:

”... pada dasarnya kelestarian daripada lingkungan sungai Siak adalah tanggungjawab semua pihak namun sebagai koordinator pelaksanaannya adalah BLH Propinsi Riau yang terus melakukan pemantauan dan menjalin kerjasama dengan BLH Kabupaten atau Kota. Dimana setiap satu semester atau setahun dua kali dilakukan penelitian kualitas air di sungai siak. Dari hasil itulah dapat diketahui apakah masing-masing Kabupaten atau Kota yang dialiri sungai siak menjaga kebersihan kualitas air, sehingga secara ringkas BLH Kabupaten atau Kota memiliki peran strategis untuk penyelamatan sungai siak ...” (Wawancara dengan Drs. Arbaini, MT Kabid Pencemaran BLH Riau, 04 Desember 2011).

Persoalan yang kini menjadi sebuah bomerang bagi pemerintah dalam hal ini BLH Propinsi Riau sebagai pelaksana teknisnya mengapa tidak, seruan untuk larangan membuang sampah memang terus bergulir oleh BLH Propinsi Riau namun kenyataannya dipandang berbeda dengan teori yang dikumandangkan oleh pemerintah sebab tidak ada satupun tong sampah didaerah pemukiman masyarakat dituding sebagai salah satu masyarakat tetap membuang sampah ke sungai, berikut ungkapan salah satu masyarakat yang tinggal di tepian sungai siak:

”... memang dibeberapa tempat didaerah ini pemerintah menyerukan untuk melarang membuang sampah di sungai siak, akan tetapi pemerintah juga tidak mengerti apa mau masyarakat kalau kami dilarang membuang sampah di sungai kemana kami harus membuang sampahnya sementara pemerintah tidak menyediakan tong sampah untuk kami membuang sampah setiap harinya. Jadi jangan pemerintah hanya menyalahkan masyarakat saja kenapa harus membuang sampah ke sungai langsung, kalau kami mau menimbun sampah tidak mungkin lagi rumah disini sudah sangat rapat-rapat jadi kami minta pemerintah menyediakan tong sampah yang besar agar juga tertib untuk membuang sampah...” (Wawancara dengan Almasri masyarakat Jalan Nelayan, 04 Desember 2011).

Gambar 2.

Himbauan oleh BLH Provinsi Riau larangan membuang sampah ke sungai



(sumber: observasi lapangan, 4 Desember 2011)

Dalam mengatasi pencemaran lingkungan disungai Siak maka BLH Propinsi Riau saat ini tengah menyusun ketentuan dasar penyimpanan dan pemakaian limbah beracun dan berbahaya (B3), hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi serta mengategorikan limbah-limbah berbahaya dan tidak berbahaya atau limbah yang dapat dikelola atau yang tidak dapat dikelola kembali. Limbah B3 yang tidak bisa dimanfaatkan kembali atau yang berbahaya masih menjadi kewenangan pusat tapi ada limbah B3 yang bisa dimanfaatkan Provinsi seperti bentuk oli bekas dan baterai serta tumbukan besi-besi tua. Apabila hal ini telah tersosialisasikan oleh masyarakat, maka dengan tersendirinya bisa dimanfaatkan sebagai peluang bisnis serta berdampak positif untuk mengurangi

tingkat pencemaran sungai Siak seperti hasil wawancara dengan BLH Provinsi

Riau:

”... tidak semua limbah itu harus dibuang dan tidak dapat digunakan kembali persepsi seperti itu salah sebagai contoh oli bekas yang bisa diolah kembali sehingga tidak terbuang percuma. Untuk pengelolaan limbah B3, Riau bisa bekerjasama dengan Malaysia dan Singapura, sehingga bisa mendapatkan dua keuntungan yakni bisa menerima limbah dari luar negeri untuk diolah sekaligus mengurangi pengangguran karena bisa dipekerjakan untuk pengelolaan limbah tersebut, namun pengelolaan limbah B3 itu butuh teknologi tinggi dan harus dikelola SDM andal agar tidak menimbulkan polemik ditengah masyarakat...” (Wawancara dengan Tetty Purnama Dewi, S.Pi., M.Si, Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan BLH Propinsi Riau, 04 Desember 2011).

Gambar 3.

Bentuk pengelolaan Limbah B3 yang ada sekarang



(Sumber: observasi 4 desember 2011)

Langkah berikutnya yang diambil oleh BLH Provinsi Riau dalam mengatasi pencemaran sungai siak adalah dengan membangun septictank

komunal bagi masyarakat tempatan disekitar sungai Siak dan developer-developer yang membangun perumahan di tepian sungai Siak. Untuk masyarakat yang tinggal disekitar sungai Siak maka BLH Propinsi Riau mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk menganggarkan dana yang berguna membangun septictank komunal yang berguna mencegah pencemaran. Septictank dibangun menjadi satu saja, artinya untuk setiap RT/RW hanya menggunakan satu septictank saja sehingga dalam setiap RT/RW tidak perlu repot-repon membangun satu septictank untuk satu rumah.

Hal ini dimaksudkan untuk melakukan pencegahan masal akibat setiap rumah memiliki satu septictank disetiap rumah yang menghasilkan limbah domestik yang berpotensi besar mencemari sungai siak, oleh karena itu BLH Provinsi Riau mengusulkan kepada pemerintah untuk meminta bantuan dari dana APBN hal ini diutarakan oleh Kabid Perencanaan BLH Provinsi Riau, berikut petikan wawancaranya:

”... saat ini sedang dilakukan pembuatan disain septictank komunal bagi 200 KK yang rencananya akan dibangun berdekatan dengan lokasi water front city (WTC) dibawah jembatan siak. Pembangunan septictank komunal bakal menjadi percontohan bagi di Indonesia, hal tersebut butuh dukungan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam hal pendanaan pembangunannya yang memakan biaya yang cukup tinggi. Akan tetapi pembangunan disain septictank komunal tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan lima Bupati dan Walikota yang bersinggungan dengan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak...” (Wawancara dengan Drs. Arbaini, MT Kabid Pencemaran BLH Riau, 04 Desember 2011).

## **B. Mobilitas Sosial Masyarakat Tempatan di Bantaran Sungai Siak di Kota Pekanbaru**

Meski Propinsi Riau telah memasuki usia 54 tahun pada Agustus 2011 lalu, persoalan pencemaran lingkungan sungai Siak belum juga berhenti. Banyak pihak yang menuding keberadaan perusahaan-perusahaan, hotel, rumah makan dan limbah masyarakat menjadi penyebab tercemarnya lingkungan sungai Siak. Hingga detik ini, pencemaran lingkungan menjadi estafet yang terus menerus dan cenderung semakin memprihatinkan akibat kurangnya kesadaran terhadap lingkungan yang pada akhirnya bukan tidak mungkin mengakibatkan kerugian sepanjang masa, baik bagi kepentingan daerah ataupun masyarakat.

Meski keberadaannya sudah dibekali dengan Undang-Undang, Perda dan aturan-aturan hukum lainnya akan tetapi pelanggaran terhadap perusakan lingkungan masih saja terjadi. Cerminan inilah yang menjadi pertimbangan bagi aktivis lingkungan untuk mendirikan sebuah lembaga yang menitikberatkan pada penyelamatan lingkungan, lahirnya LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang memfokuskan diri kepada persoalan lingkungan secara tidak langsung memberikan nilai positif terhadap roda pemerintahan untuk memberikan saran dan kritikan kepada pemerintah daerah maupun pusat. Sebut saja Rona Lingkungan Universitas Riau, Yayasan Elang, Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) dan Jikalahari memberikan warna tersendiri terhadap persoalan-persoalan lingkungan. Kehadiran LSM yang bergerak dibidang lingkungan ini menjadi pertimbangan sendiri bagi pemerintah daerah untuk mengumpulkan data dan fakta yang terjadi

dilapangan mengenai pencemaran lingkungan terutama pencemaran Sungai Siak di Kota Pekanbaru, , hal ini diutarakan oleh Walhi Riau:

“... perlu dibuat suatu perangkat hukum dan sejumlah aparat untuk melakukan pemantauan secara kontinyu terhadap pengawasan untuk menjaga DAS Sungai Siak agar tidak tersumbat dan tercemar. Fakta mengatakan bahwa Riau khususnya Kota Pekanbaru banyak jalan-jalan yang tergenang air ketika hujan turun ini membuktikan bahwa DAS Sungai Siak tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Ulah oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab menjadi seluruh elemen yang tidak bersalah terkena dampaknya. Selain itu perilaku masyarakat membuang sampah menjadikan keadaan Sungai Siak semakin tercemar ditambah lagi keberadaan perusahaan disekitar areal Sungai Siak menambah deretan limbah semakin tidak terkontrol...” (Wawancara dengan Hariansyah Usman Direktur Esekutif Walhi Riau, 7 Desember 2011).

Gambar 3.

Tampak sungai Siak dari Jembatan Leighton yang di pinggirnya berdiri PT Karet Rekri, salah satu penghasil limbah yang mencemari sungai



(Sumber: observasi 4 desember 2011)

BLH (Badan Lingkungan Hidup) Provinsi Riau berpandangan bahwa pencemaran lingkungan di sungai Siak berasal dari limbah domestik, pencemaran sungai Siak ini terjadi akibat ekoli yang merupakan sampah yang berasal dari kamar mandi dan sampah-sampah dapur, hal ini dikatakan oleh Humas Badan Lingkungan Hidup (BLH) Riau:

“... pencemaran sungai Siak terjadi akibat sampah domestik yang berasal dari limbah rumah tangga masyarakat, limbah-limbah rumah tangga tersebut berupa plastic, sisa sabun, sisa santan, bumbu-bumbu masakan dan limbah lainnya. Tidak hanya itu aktivitas masyarakat setempat yang melakukan MCK (Mandi Cuci Kakus) juga menjadi salah satu penyebab pencemaran, sehingga dengan adanya limbah ini maka menyebabkan kualitas air menjadi tercemar...”. (Wawancara dengan Zulfikar M.Si Humas Badan Lingkungan Hidup, 4 Desember 2011).

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan oleh BLH Riau diatas maka sebagai dasar otentik maka penulis melakukan observasi langsung dan melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar sungai Siak yang berada di Jalan Tanjung Batu. Ketika berada dilokasi Tanjung Datuk penulis menemukan memang masih banyak masyarakat yang melakukan aktivitas MCK di Sungai Siak tidak jauh dari tempat tinggal mereka yang berkisar sekitar 50 meter saja.

Meskipun mereka memiliki toilet didalam rumah, toilet tidak memiliki banyak arti bagi masyarakat di tepian sungai Siak, seperti yang diungkapkan oleh Nurhalena (50), Iis (30), Geri (9), Dede (12), Yanto (46) dan masih banyak lagi penduduk di kawasan itu menganggap buang hajat di sungai adalah budaya mereka. “ Memang dari dulu kami memang begini”, ungkap mereka senada, masyarakat Tanjung Batu telah melakukan aktivitas ini sudah sejak lama bahkan kondisi ini telah turun menurun mereka lakukan setiap harinya.

Menurut Nurhalena salah satu warga jalan Tanjung Batu mengungkapkan, sebenarnya banyak juga penduduk di sekitar sini yang punya toilet khususnya mereka yang memiliki rumah. Kebanyakan yang tidak memiliki toilet adalah mereka yang menyewa rumah, berikut kutipan wawancara dengan salah satu penduduk ditepian Sungai Siak Jalan Tanjung Batu:

“... walaupun kebanyakan masyarakat disini telah banyak yang memiliki toilet didalam rumah sendiri tetapi masih banyak warga yang buang hajat di tepi Sungai Siak, kebiasaan buang hajat ditepi Sungai Siak dengan bentuk toilet seadanya lebih enak dibandingkan buang hajat di toilet rumah karena sudah terbiasa sejak dulunya. Kebanyakan orang-orang tua dahulu malah tidak pernah buang hajat dirumah malah kebanyakan di tepian Sungai Siak saja ...” (Wawancara dengan Nurhalena warga Jalan Tanjung Batu, 1 Desember 2011).

Selain membuang hajat di tepian sungai Siak ternyata memang banyak ditemui masyarakat yang melakukan aktifitas mencuci piring bahkan mandi di tepian sungai Siak dan mereka juga membuat tempat khusus yang dibuat sendiri menyerupai rakit, seperti yang dijelaskan salah satu warga Jalan Tanjung Batu berikut:

“... kalau mandi, nyuci dan buang air besar warga disini memang perginya ke sungai karena ini sudah menjadi tradisi dari dahulu, sejak kecil sampai setua ini saya kalau nyuci piring dan buang air besar kesungai kecuali mandi kadang-kadang di rumah dan kadang-kadang juga di sungai, khusus mandi kami melihat waktunya juga, kalau air lagi pasang memang mandi di sungai siak ini tetapi kalau airnya dangkal kami mandi disumur saja, sebab kalau airnya dangkal kulit menjadi gatal-gatal...” (Wawancara dengan Hasna warga Jalan Tanjung Batu, 1 Desember 2011).

Melihat kondisi dilapangan BLH Riau yang diwakili oleh Drs. Arbaini, MT sebagai pelaksana di lapangan mengatakan bahwa limbah domestic yang

dihasilkan oleh masyarakat tepian sungai Siak akan mencapai puncak tingkat pencemarannya pada waktu pukul 04.00 WIB sore keatas sebab pembuangan limbah masyarakat pada jam tersebut bersamaan, dimana aktivitas cuci, mandi, kakus berlangsung, berikut petikan singkat Kepala Bidang Pencemaran BLH Riau diruang kerjanya:

“...berdasarkan observasi yang telah BLH lakukan sepanjang sungai siak Pekanbaru dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pencemaran ini akan mengalami puncaknya pada sekitar pukul 04.00 WIB keatas sehingga masyarakat yang tinggal di daerah pemukiman sungai siak harus peduli terhadap lingkungan. Karena setiap satu KK (Kepala Keluarga) akan membuang limbah 200 gr per hari setiap satu orangnya. Bayangkan rata-rata KK menghasilkan limbah yang sangat banyak dan ini juga dilakukan setiap harinya. Sehingga dituntut kesadaran kepada masyarakat bahwa kelestarian lingkungan sungai siak harus tetap dijaga bersama-sama ...” (Wawancara dengan Drs. Arbaini, MT Kabid Pencemaran BLH Riau, 4 Desember 2011).

Namun tidak hanya limbah domestic saja limbah yang bersifat continue terjadi mencemari sungai Siak akan tetapi, pencemaran sungai Siak juga didominasi oleh limbah Puskesmas, rumah sakit, restoran dan hotel-hotel yang belum mempunyai IPAL (Intalasi Pembuangan Limbah) yang menghasilkan limbah-limbah berupa bahan-bahan kimia. Bila dikaji lebih dalam limbah-limbah tersebut jauh lebih berbahaya bila dibanding limbah domestic yang dihasilkan masyarakat meski jumlah lebih sedikit. Akan tetapi kejadian tersebut seakan kasat mata oleh pemerintah, pemerintah hanya melakukan himbauan-himbauan saja kepada pelaku kejahatan lingkungan tanpa berbuat banyak untuk menindak tegasnya. BLH Riau sebagai coordinator penyelamatan lingkungan di Riau hanya baru bisa melakukan tindakan berupa himbauan saja belum berupa tindakan

dengan menjatuhkan sanksi. Seperti kutipan wawancara berikut ini dengan Kabid

Pencemaran BLH Riau:

“... limbah-limbah tersebut sangat mempengaruhi tingkat pencemaran dan kadar air sungai siak untuk semakin tercemar. Untuk saat ini hotel sekitar sungai siak tersebut baru atau hotel saja yang memiliki IPAL yang dikategorikan baik sedangkan hotel-hotel lainnya belum memiliki IPAL dan membuang sampah langsung terjun saja ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu. Untuk langkah antisipasi mencegah pencemaran lingkungan di sungai siak maka BLH mempunyai langkah meski masih dalam konsep, yakni setiap KK, Puskesmas, Rumah Sakit, Restoran dan Hotel harus menyediakan IPAL sebagai langkah antisipasi untuk mengurangi tingkat pencemaran yang semakin parah...” (Wawancara dengan Drs. Arbaini, MT Kabid Pencemaran BLH Riau, 04 Desember 2011).

Menurut Direktur Rona Lingkungan dari Universitas Riau Tengku Ariful Amri mengungkapkan, limbah yang mencemari air sungai Siak dan membunuh berbagai jenis ikan pada tahun 2004 telah meluas hingga kawasan hilir yang terpisah sekitar 100 kilometer dari hulu sungai berkedalaman rata-rata 29 meter, perluasan tersebut diketahui setelah mendapat laporan dari masyarakat yang menemukan ikan yang mati akibat kekurangan oksigen di Perawang, Kabupaten Siak. Berikut penjelasan Direktur Rona Lingkungan Universitas Riau:

“... kematian ikan akan terus berlangsung sepanjang tahun 2004 dalam jumlah yang besar, dan tidak menutup kemungkinan hal ini akan terjadi lagi pada tahun-tahun mendatang apabila tidak ada pencegahan sejak dini. Untuk menjaga hal itu harus menjaga keseimbangan air hingga kadar oksigen terlarut dalam air sungai siak normal, kejadian pada tahun 2004 lalu total ikan yang mati menjadi 1,5 ton. Harapan kita semua jangan sampai kejadian ini mengakibatkan kematian kepada manusia karena tingkat pencemaran yang semakin membahayakan...” (Wawancara dengan Tengku Ariful Amri, MSc Direktur Rona Lingkungan Universitas Riau – Pekanbaru, 10 Desember 2011).

Berdasarkan data yang diperoleh oleh Rona Lingkungan Universitas Riau telah terjadi penurunan kualitas air di sungai Siak sehingga bisa menyebabkan kematian pada ikan-ikan, seperti penegasan yang diungkap oleh Direktur Rona Lingkungan Universitas Riau, berikut petikan wawancara dengan Direktur Rona Lingkungan Universitas Riau:

“... pada tanggal 2 Juni 2004 lalu, saat kami mengambil contoh air dari sungai Siak diketahui kondisi DO di sungai Siak ini masih baik, 2 hingga 3 ppm. Namun hanya dalam waktu singkat kandungan oksigen turun drastis, hal itu hanya dapat terjadi akibat kandungan pupuk organik yang sangat tinggi hal tersebut terjadi karena dibagian hulu banyak pabrik pengolahan minyak kelapa sawit dan perkebunannya...” (Wawancara dengan Tengku Ariful Amri, MSc Direktur Rona Lingkungan Universitas Riau 10 Desember 2011).

Hal senada juga diutarakan oleh Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) Riau yang mengatakan bahwa 60 persen yang mencemari sungai Siak adalah limbah masyarakat yang berasal dari aktifitas warga sekitar tepian sungai Siak. Limbah masyarakat berupa bahan plastik yang menumpuk di badan sungai Siak tiap tahun terus bertambah, bahkan limbah tersebut telah mengancam kedangkalan sungai tersebut. Hal ini dipaparkan oleh Direktur Eksekutif Walhi Riau:

”... dari hasil pemantauan lapangan yang dilakukannya, tumpukan sampah plastik di badan sungai Siak terutama di areal pemukiman dan dermaga terus mengalami peningkatan. Contohnya di ruas badan sungai Siak yang pada pemukiman dari jembatan Siak I tumpukan plastik di ruas tersebut sangat tinggi. Deposit limbah plastik di kawasan tersebut mencapai tiga meter ...” (Wawancara dengan Hariansyah Usman Direktur Eksekutif Walhi Riau, 7 Desember 2011).

Perilaku masyarakat sebetulnya dapat diubah jika ada kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan pemerintah daerah mau membangun tempat pembuangan sampah di lingkungan padat penduduk yang berada ditepian sungai, hal ini kembali ditegaskan oleh Walhi:

”... yang terjadi selama ini tidak ada tong sampah yang dibangun Pemda di pinggiran sungai akibatnya masyarakat begitu saja membuang sampah ke badan sungai. Pemerintah daerah harus proaktif mensosialisasikan hidup bersih kepada masyarakat dan agar sungai siak tidak dipadati limbah dan berdampak terhadap lingkungan...” (Wawancara dengan Hariansyah Usman Direktur Eksekutif Walhi Riau, 7 Desember 2011).

Selain melihat persoalan diatas Walhi yang dikomandoi oleh Hariansyah Usman mengatakan bahwa tidak hanya limbah yang dihasil oleh masyarakat saja yang berdampak kepada pencemaran akan tetapi ada hal lain yang jauh lebih berbahaya dengan waktu yang singkat dapat merusak sungai Siak, hal yang berbahaya tersebut adalah tanaman kelapa sawit yang kini marak dilakukan baik oleh masyarakat maupun pengusaha di daerah aliran sungai Siak dapat menjadi ancaman kelestarian sungai terdalam di indonesia itu. Berikut ringkasan wawancara dengan Direktur Walhi Riau:

”... perkebunan kelapa sawit sebaiknya tidak diizinkan lagi dibangun di sepanjang DAS (Daerah Aliran Sungai) siak karena dapat merusak lingkungan perairan sungai, saat ini disepanjang DAS siak terdapat sekitar 800.000 hektar perkebunan sawit, Walhi khawatir dengan kebijakan pemerintah daerah yang dilalui DAS siak karena terus menerus mengeluarkan kelapa sawit dapat menjadi gangguan bagi DAS siak karena pencemarannya berasal dari pemakaian pupuk tanaman ...” (Wawancara dengan Hariansyah Usman Direktur Eksekutif Walhi Riau, 7 Desember 2011).

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan Aktivitas humas BLH Provinsi Riau dalam melakukan pencegahan dalam kelestarian lingkungan terutama sungai Siak sudah berjalan dengan maksimal, namun sungguh banyak kendala dalam pencegahannya, di samping kurangnya koordinasi dengan pihak lain, BLH Provinsi Riau juga harus bekerjasama dengan pihak yang berwajib, karena penulis lihat ini bukan hal yang mudah dalam pencegahan, yang mana semua Limbah domestic merupakan limbah yang dihasilkan oleh industri rumah tangga. Salah satu penyebab tercemarnya sungai Siak adalah akibat limbah domestik, berupa plastik, sisa-sisa makanan dan kotoran manusia. Akan tetapi, selain limbah domestik yang dihasilkan oleh industri rumah tangga, limbah puskesmas (Pusat kesehatan masyarakat), rumah sakit, rumah makan, usaha kecil lainnya juga berpotensi besar terhadap tercemarnya sungai Siak, Sedangkan untuk pelaku usaha seperti medis, rumah makan dan usaha lainya yang berpotensi menghasilkan limbah agar menggunakan IPAL (Instalasi Pembuangan Limbah) sebelum membuang limbahnya ke sungai Siak, dan juga telah banyak berdiri kebun kelapa sawit yang juga akan menyebabkan tercemarnya sungai Siak, namun pencemaran tetap berlangsung hingga sekarang, walaupun ada himbauan-himbaun atau penyuluhan yang telah dilakukan oleh BLH Provinsi Riau.

## **C. Faktor Pendukung dan Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Menanggulangi Tingkat Pencemaran Sungai Siak di Kota Pekanbaru**

### **1. Faktor Pendukung**

Aktivitas Humas BLH Propinsi Riau dalam melaksanakan program-program harus menjalin koordinasi dengan lembaga lainnya, untuk menanggulangi tingkat pencemaran sungai Siak memiliki tim yang cukup untuk melakukan penelitian kualitas sungai Siak. Hal ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan kualitas air di sungai Siak. Berikut beberapa hal yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan program tersebut:

#### **a. Koordinasi Antar BLH se-Riau**

Salah satu faktor pendukung terlaksananya kinerja dalam melaksanakan penanggulangan pencemaran sungai Siak adalah terjalinnya kerjasama antara BLH se-Riau, dimana antara BLH Kota/Kabupaten terus melakukan koordinasi antar lembaga untuk mengetahui berbagai perkembangan tentang kualitas sungai Siak. BLH Propinsi Riau yang berkedudukan di Riau merupakan koordinator bagi BLH Kota/ Kabupaten untuk menjaga kualitas air sungai agar tidak tercemar mulai dari hulu hingga ke hilir.

Sebagai koordinator maka BLH Riau melakukan dua kali penelitian setiap tahunnya untuk melihat keadaan kualitas air sungai siak. Adapun pelaksanaan pengambilan sampel penelitian untuk mengetahui kualitas dilakukan pada dua musim yakni pada musim penghujan dan pada musim kemarau. Hal dilakukan untuk mengetahui kualitas air pada dua musim tersebut dan untuk mengetahui

tingkat pencemaran yang terjadi di sungai Siak. Seperti yang dijelaskan oleh Sub

Bidang Pengendalian BLH Riau:

”...untuk mengetahui keadaan kualitas air sungai siak maka setiap tahun dilakukan dua kali pengambilan sampel untuk penelitian. Penelitian pertama dilakukan pada semester pertama atau enam bulan sekali pada musim hujan dan yang kedua adalah dilakukan pada musim kemarau. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kualitas air berdasarkan dua musim, serta untuk mengetahui terjadinya peningkatan pencemaran setiap kali dilakukan penelitian...”(Wawancara dengan Tetty Purnama Dewi, S.Pi., M.Si Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan BLH Riau, 04 Desember 2011)

b. Penelitian Internal Secara Berkala

Untuk mengetahui tingkat pencemaran yang terjadi di sungai Siak setiap tahunnya BLH Propinsi Riau melakukan penelitian baku mutu kualitas air sungai Siak dengan mengambil sampel pada dua musim. Untuk semester pertama pengambilan sampel dilakukan pada musim penghujan, sedangkan untuk semester dua pengambilan sampel air dilakukan pada musim kemarau. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi tingkat pencemaran setiap tahunnya.

Penelitian tersebut juga bermanfaat untuk mengetahui apakah air sungai Siak mengalami pencemaran yang tinggi atau mengalami penurunan. Hasil dari laporan tersebut kemudian sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah untuk mengetahui kegiatan atau usaha-usaha masyarakat yang mempengaruhi kualitas air sungai siak. Untuk lebih mempertegas berikut kutipan wawancara dengan BLH Propinsi Riau:

”...penelitian dua musim ini dimaksudkan sebagai laporan kepada kepala daerah tentang perkembangan terakhir keberadaan sungai siak. Apakah

kualitas air sungai siak mengalami peningkatan pencemaran atau mengalami penurunan. Hal ini yang menjadi pegangan dasar BLH Riau untuk mengambil kesimpulan telah terjadi memburuknya keadaan sungai siak atau semakin memprihatinkan. Dari hasil penelitian tersebut akan terlihat bentuk konkrit yang akan diambil pemerintah dalam menanggulangi pencemaran sungai siak, apakah akan dilakukan sosialisasi-sosialisasi lebih lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah ...” (Wawancara dengan Tetty Purnama Dewi, S.Pi., M.Si Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan BLH Riau, 04 Desember 2011 )

## **2. Faktor Penghambat**

Seperti yang telah diulas diatas bahwa dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi penanggulangan pencemaran sungai siak di Kota Pekanbaru ada faktor pendukung dan faktor penghambatnya, berikut ulasan mengenai apa-apa saja faktor penghambat BLH Riau dalam menjalankan sosialisasi penanggulangan pencemaran sungai siak.

### **a. Dana Operasional Belum Memadai**

Untuk memuluskan langkah melaksanakan fungsinya sebagai lingkungan hidup tentunya BLH Riau harus memiliki dana operasional yang cukup tinggi, salah satu faktor penghambat mengapa sungai siak belum diperhatikan secara serius yang menjadi faktornya adalah dana, dimana untuk melakukan penelitian pengambilan sampel sungai siak saja dan menguji kualitas airnya belum bisa dilakukan secara efektif, sebab hingga saat ini BLH Riau belum memiliki laboratorium sendiri.

Inilah yang menjadi salah satu faktor penghambat program BLH Riau dalam melakukan aktivitasnya, sejauh ini untuk melakukan penelitian tersebut BLH Riau masih menumpang ditempat lain untuk menanti pekerjaannya. Sehingga untuk memperlancar kerja BLH Riau dalam mengatasi pencemaran sungai siak perlu adanya laboratorium tersebut, berikut ungkapan pegawai BLH Riau :

”... laboratorium sebenarnya sangat penting bagi BLH Riau untuk memperlancar kinerja untuk mengetahui kualitas air sungai sewaktu-waktu dibutuhkan sampelnya. Sehingga dalam bertugas tim sering direpotkan untuk mengetahui hasil penelitian tersebut memakan waktu yang cukup lama. Selain itu juga memakan biaya yang cukup tinggi untuk melakukan penelitian. Persoalan ini diharapkan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk mengupayakan agar BLH Riau memiliki laboratorium sendiri, bahkan kita berharap setiap BLH Kota/ Kabupaten memiliki laboratorium sendiri agar pekerjaan menjadi lebih efektif...” (Wawancara dengan Tetty Purnama Dewi, S.Pi., M.Si Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan BLH Riau, 04 Desember 2011 )

b. Penyadaran atas Sungai Siak

Peran masyarakat tepian sungai Siak merupakan kunci suksesnya untuk melindungi sungai siak untuk tidak tercemar semakin parah. Sebab masyarakat tepian sungai siak merupakan penghasil sumber limbah padat yang terbesar disamping masyarakat diluar tepian sungai Siak yang juga membuang sampah ke sungai. Perilaku membuang sampah sudah merupakan hal yang biasa dilakukan masyarakat setempat dimana membuang sampah ke sungai menjadi pekerjaan yang mudah tanpa harus mengeluarkan biaya dan tidak membuang waktu.

Perilaku masyarakat yang membuang sampah terjadi setiap hari, tidak hanya itu aktivitas masyarakat yang berdagang seperti penjual jagung bakar disekitar sungai siak juga membuang sampahnya disungai. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di lokasi penelitian, terutama dibawah jembatan sungai siak penulis mendapatkan aktivitas pedagang jagung bakar disekitar bahwa jembatan membuang sampah jagung mereka langsung ke sungai siak. Padahal larangan membuang sampah ke sungai siak telah terpampang jelas di sekitar sungai, berikut kutipan wawancara dengan salah satu penjual jagung bakar di sekitar bawah jembatan:

”... memang pedagang disini tahu kalau membuang sampah ke sungai siak ini dilarang, tetapi apabila kulit jagung ini dibiarkan terlalu lama malahan akan menimbulkan bau tidak sedap dan banyak lalatnya. Jadi upaya lebih gampang ya saya membuang kulit jagung ini ke dalam sungai saja, kan sampahnya dibawa arus dan tidak mungkin menimbulkan bau lagi. Bagi selagi airnya mengalir itu tidak masalah kecuali air menggenang begitu saja...” (Wawancara dengan Saripah, salah satu pedagang jagung bakar di bawah jembatan sungai siak, 7 Desember 2011 ).

c. Lemahnya Penegakan Hukum

Salah satu faktor penghambat dalam aktivitas humas BLH dalam menanggulangi tingkat pencemaran sungai Siak adalah lemahnya penegakan supermasi hukum. Padahal jika ditelisik kembali BLH Provinsi Riau berpedoman kepada peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang pengendalian pencemaran air, berapa banyak kejadian yang semuanya ulah tangan manusia yang ada di sepanjang bantaran sungai Siak, sebut saja fakta kejadian diperkirakan sekitar 1,5 ton ikan mati sepanjang sungai Siak pada tahun 2004 silam. Meski

kematian ikan-ikan tersebut belum bisa dipastikan secara akurat tetapi jelas indikasi kuat mengarah terjadinya tindak pidana lingkungan sudah dapat dilihat secara kasat mata. Namun setelah peristiwa tersebut sudah berlalu selama tujuh tahun, hingga detik ini pemerintahan belum bisa membuktikan dan menarik satupun tersangka dan dijerat dengan hukum yang berlaku.

Menanggapi persoalan diatas yang diwakili oleh sub bidang bantuan hukum BLH

”... Untuk upaya hukum sejauh ini di Riau memang belum ada yang dijadikan tersangka dalam pencemaran lingkungan di sungai Siak, namun penyelidikan kearah sana sudah dilakukan semaksimal mungkin, kita dari BLH terus berupaya agar pelaku kejahatan yang secara hukum terbukti melakukan pencemaran akan ditindak secara hukum. Untuk itu peran aktif dari masyarakat dan LSM sangat diharapkan...” (Wawancara dengan Raja Syaiful, SH, Sub Bidang bantuan Hukum BLH Riau, 04 Desember 2011 ).

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan Aktivitas humas BLH Provinsi Riau dalam melakukan pencegahan dalam kelestarian lingkungan terutama sungai Siak sudah berjalan dengan maksimal, namun sungguh banyak kendala dalam pencegahannya, di samping kurangnya koordinasi dengan pihak lain, BLH Provinsi riau juga harus bekerjasama dengan pihak yang berwajib, karena penulis lihat ini bukan hal yang mudah dalam pencegahan, yang mana semua Limbah domestic merupakan limbah yang dihasilkan oleh industri rumah tangga. Salah satu penyebab tercemarnya sungai Siak adalah akibat limbah domestik, berupa plastik, sisa-sisa makanan dan kotoran manusia. Akan tetapi, selain limbah domestik yang dihasilkan oleh industri rumah tangga, limbah puskesmas (Pusat kesehatan masyarakat), rumah sakit, rumah makan, usaha kecil lainnya juga berpotensi besar terhadap tercemarnya sungai Siak, Sedangkan untuk

pelaku usaha seperti medis, rumah makan dan usaha lainya yang berpotensi menghasilkan limbah agar menggunakan IPAL (Instalasi Pembuangan Limbah) sebelum membuang limbahnya ke sungai Siak, dan juga telah banyak berdiri kebun kelapa sawit yang juga akan menyebabkan tercemarnya sunga Siak, namun pencemaran tetap berlangsung hingga sekarang, walaupun ada himbauan-himbaun atau penyuluhan yang telah dilakukan oleh BLH Provinsi Riau.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **A. Aktivitas Humas Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau**

Aktivitas secara umum dapat diartikan sebagai kegiatan pelaksanaan tugas-tugas pokok dalam system. Aktivitas dalam humas berkaitan dengan fungsi dan tugas yang dijalankannya dalam rangka mencapai tujuan visi dan misi yang diharapkan oleh perusahaan atau organisasi.

Aktivitas Humas BLH Provinsi Riau dalam menanggulangi tingkat pencemaran sungai Siak dapat diartikan sebagai kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi pokok humas yang dijalankan dalam mencapai tujuan visi dan misi yang diharapkan oleh organisasi atau perusahaan. Mengingat pentingnya humas sudah seharusnya berada di jajaran *top manajemen* ( Manajemen Puncak ) dalam suatu struktur organisasi. Hal ini juga terlihat pada BLH Provinsi Riau dimana dalam struktur organisasinya humas berdiri sendiri dan tidak disatukan dengan sub bagian lainnya. Tepatnya humas berada pada sub bagian Umum dan Kehumasan. Penempatan humas pada sub bagian Umum dan Kehumasan sangat membantu humas dalam menjalankan tugas dan perannya.

Berdasarkan hasil penelitian peran utama humas yaitu untuk mensosialisasikan visi misi organisasi yaitu *lingkungan hidup, pelestarian fungsi lingkungan hidup* dan *pengelolaan lingkungan hidup*.

Suatu perusahaan atau organisasi yang baik adalah yang berhasil mencapai cita-cita dan tujuan dengan lancar. Begitu juga dengan kerja praktisi humas Badan lingkungan Hidup dimana humas bertugas untuk menjaga kerusakan lingkungan terutama pencemaran sungai yaitu sungai Siak, disamping aktivitas eksternal humas internal humas Badan Lingkungan hidup Provinsi Riau yaitu menciptakan situasi kerja yang kondusif dengan memberikan motivasi kepada pegawai, membicarakan hasil kerja, memberikan pengarahan kepada pegawai untuk perbaikan kerja.

Publik eksternal sebagai sasaran kegiatan humas terdiri atas orang-orang atau anggota-anggotanya masyarakat di luar organisasi, baik yang ada kaitannya dengan organisasinya maupun yang diharapkan atau diduga tidak ada kaitannya dengan organisasi. Aktivitas eksternal humas ini bertujuan untuk mencari serta dan mendapatkan dukungan dari publik yang berada di luar organisasi atau perusahaan (Djaja, 1985: 28).

Sebagai ujung tombak organisasi atau perusahaan aktivitas humas yang berhubungan dengan publik eksternal, Aktivitas Humas BLH Provinsi riau secara rinci berdasarkan tinjauan teori yang digunakan (Ruslan,2008:26) dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

**a. *Communicator***

Artinya kemampuan Humas BLH Provinsi Riau sebagai komunikator baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui media cetak/elektronik dan lisan

(*Spoke Person*) atau tatap muka dan sebagainya. Disamping itu juga bertindak sebagai mediator dan sekaligus persuader (Ruslan,2008:26).

Aktivitas Humas BLH yaitu telah memberikan layanan informasi melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tempatan di bantaran sungai Siak tentang kesadaran lingkungan, pelarangan buang sampah dan kelestarian alam lainnya, hal ini salah satu tugas pokok Badan Lingkungan Hidup yang mempunyai visi dan misi yaitu: *lingkungan hidup, pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan hidup*.

Sosialisai atau penyuluhan merupakan suatu *spesial event* dari aktivitas humas Badan Lingkungan Hidup yang dilakukan ke masyarakat, Perusahaan-perusahaan dan para pelaku industri yang berpotensi menyebabkan terjadinya pencemaran sungai.

Meskipun telah adanya penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah kedalam Sungai Siak akan tetapi masih banyak diantara masyarakat yang melanggarnya. Selain itu aktivitas MCK di sekitar tepian Sungai Siak hingga saat ini seperti yang dilakukan oleh warga Jalan Tanjung Batu dimana aktivitas buang hajat langsung ke sungai sudah merupakan budaya yang dilakukan secara turun menurun bahkan sebagian besar masyarakat di tepian Sungai Siak tidak memiliki toilet. Untuk itu dalam program-program yang telah dilakukan oleh BLH Riau dan menghimbau masyarakat untuk sadar akan kebersihan lingkungan Sungai Siak.

Budaya membuang hajat di tepian Sungai Siak sudah menjadi budaya atau kebiasaan warga setempat. Untuk itulah BLH Riau dituntut harus bisa membuat suatu program yang mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat tepian Sungai Siak untuk membuang hajat di toilet rumah tidak lagi membuang hajat langsung ke Sungai. Berdasarkan data dari BLH Riau yang mengungkapkan bahwa limbah masyarakat merupakan faktor dominant yang mengakibatkan Sungai Siak tercemar, sehingga BLH Riau harus mengambil langkah cepat untuk mengatasi permasalahan tersebut sehingga pencemaran Sungai Siak kembali bersih seperti sediakala.

Selain membuang hajat di tepian Sungai Siak ternyata memang banyak ditemui masyarakat yang melakukan aktifitas mencuci piring bahkan mandi di tepian Sungai Siak dan mereka juga membuat tempat khusus yang dibuat sendiri menyerupai rakit yang di sebut dengan *Topian Mandi*.

BLH Propinsi Riau mengaku mengalami kesulitan dalam menangani masalah limbah yang dihasilkan oleh masyarakat tepian sungai siak, sebab hingga detik ini aktivitas masyarakat terus berlangsung tanpa menghiraukan himbauan-himbauan yang dilakukan pemerintah untuk tidak membuang sampah dan melakukan aktivitas MCK di sungai Siak. Namun untuk mengatasi hal tersebut di akui BLH Riau tidak cukup hanya melakukan sosialisasi atau himbauan-himbauan saja akan tetapi butuh pelaksanaan program dengan membangun WC umum yang diperuntukkan khusus untuk masyarakat tepian sungai siak akan tetapi untuk itu semua membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Sulitnya mengontrol pembuangan limbah dan sampah terutama limbah domestic yang dihasilkan oleh masyarakat terjadi setiap hari dan akan mencapai puncaknya pada pukul 14.00 WIB sore secara terus menerus, inilah yang menjadi catata estafet bagi BLH Riau tanpa harus berbuat banyak untuk menanggulangi hal tersebut, BLH Riau mengaku untuk saat ini hanya bisa melakukan pendekatan secara persuasive kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan himbauan-himbauan berupa papan pengumuman “ dilarang membuang sampah ke sungai “ namun hal tersebut dinilai belum banyak membantu untuk mengatasi pencemaran sungai siak yang kian berlangsung.

Namun tidak hanya limbah domestic saja limbah yang bersifat continue terjadi mencemari sungai siak akan tetapi, pencemaran sungai Siak juga didominasi oleh limbah Puskesmas, rumah sakit, restoran dan hotel-hotel yang belum mempunyai IPAL (Intalasi Pembuangan Limbah) yang menghasilkan limbah-limbah berupa bahan-bahan kimia.

Bila dikaji lebih dalam limbah-limbah tersebut jauh lebih berbahaya bila dibanding limbah domestic yang dihasilkan masyarakat meski jumlah lebih sedikit. Akan tetapi kejadian tersebut seakan kasat mata oleh pemerintah, pemerintah hanya melakukan himbauan-himbauan saja kepada pelaku kejahatan lingkungan tanpa berbuat banyak untuk menindak tegasnya. BLH Riau sebagai koordinator penyelamatan lingkungan di Riau hanya baru bisa melakukan tindakan berupa himbauan saja belum berupa tindakan dengan menjatuhkan sanksi yang tegas.

Langkah antisipasi yang diambil BLH Riau untuk mencegah pencemaran lingkungan di sungai siak masih relative belum efektif. Lemahnya penegakan hukum menjadi pondasi sangat berpengaruh dimana pelaku-pelaku kejahatan lingkungan belum dilakukan tindakan dengan menjerat mereka kemeja hijau sesuai dengan perangkat hukum yang berlaku. Antisipasi yang diambil BLH Riau masih berupa konsep seperti setiap KK, Puskesmas, Rumah Sakit, Restoran dan Hotel harus menyediakan IPAL sebagai langkah antisipasi untuk mengurangi tingkat pencemaran yang semakin parah, namun untuk pengawasan bagi perusahaan-perusahaan harus memiliki IPAL hingga saat ini belum terlaksana dengan baik.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari BLH Riau, terdapat sesuatu yang janggal dimana BLH Riau tidak mengetahui secara pasti berapa perusahaan di Riau yang telah memiliki IPAL, BLH Riau hanya mengutarakan bahwa rata-rata perusahaan yang berada disekitara bantaran sungai siak telah memiliki IPAL dan belum memiliki IPAL, akan tetapi BLH Riau mengakui untuk Rumah Sakit yang berada di Pekanbaru hanya tiga rumah sakit saja yang baru memiliki IPAL, sedangkan rumah sakit dan puskesmas lainnya sama sekali belum memiliki IPAL.

Adapun rumah sakit yang telah memiliki IPAL adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad Pekanbaru, Rumah Sakit Awal Bros, dan Rumah Sakit Santa Maria, Rumah Sakit Ibnu Sina. Sedangkan untuk rumah sakit yang berskala besar belum memiliki IPAL sama sekali, sebut saja, Rumah Sakit Lancang Kuning, dan Rumah Sakit Zainab bahkan yang lebih parahnya lagi

belum ada satupun Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) di seluruh kota Pekanbaru yang belum memiliki IPAL. Padahal jika diteliti limbah rumah sakit dan Puskesmas jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan limbah domestic yang dihasilkan masyarakat.

Namun secara fakta hingga saat ini BLH Riau hanya memfokuskan diri terhadap limbah domestic yang dihasilkan oleh masyarakat, limbah rumah sakit dan Puskesmas hingga detik ini belum mendapat perhatian yang serius bahkan untuk melakukan himbauan dan teguran belum dilakukan secara maksimal, inilah yang seharusnya menjadi evaluasi bagi BLH Riau untuk terus melakukan upaya strategis agar sungai Siak tidak semakin tercemar dan membahayakan, bukan rahasia umum lagi bahwa berdirinya Puskesmas, Rumah Sakit dan klinik-klinik kesehatan membuang limbah cairannya kedalam DAS Siak yang langsung tertuju ke sungai Siak.

Tidak hanya limbah-limbah seperti yang telah dipaparkan diatas saja yang menjadi persoalan namun pelaku usaha seperti developer-developer yang membangun perumahan nasional (Perumnas) sekitar sungai Siak menjadi salah satu factor penghasil limbah terbesar. Dimana developer-developer tersebut menghasilkan limbah yang memungkinkan pencemaran lebih besar salah satunya adalah membangun setiap satu rumah atau septick tank sehingga pencemaran menjadi jauh lebih tinggi. Oleh sebab itu untuk mengurangi pencemaran yang semakin hebat maka BLH menganjurkan untuk membuat septick tank di setiap RW/RT menjadi satu agar tingkat pencemaran menjadi lebih berkurang.

Uraian dan pemaparan permasalahan tentang penyebab pencemaran sungai Siak di atau sudah jelas siapa-siapa saja pelaku penghasil limbah yang menyebabkan pencemaran. Disinilah dapat diambil sebuah catatan bahwa pemerintah belum memaksimalkan penegakan hukum dan mengembalikan kondisi sungai siak menjadi bersih kembali. Sebab pemerintah dihadapan pada persoalan komersial dimana pemerintah belum banyak berbuat banyak sebab keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut merupakan PAD bagi Riau, sehingga sedikit banyak mempengaruhi terhadap kebijakan yang akan diambil dan tidak dapat dipungkiri masyarakat yang menjadi sasaran empuknya.

Hal berbeda justru di kemukakan oleh beberapa LSM lingkungan, LSM ini berpandangan bahwa pencemaran lingkungan di sungai Siak tidak semata-mata dihasilkan oleh limbah domestic yang dihasilkan masyarakat saja namun berbagai hal mempengaruhi seperti keberadaan kebun kelapa sawit, berdirinya perusahaan-perusahaan sekitar DAS dan letak tata kota yang semerawutan.

**b. *Relationship***

Kemampuan PR membangun hubungan positif antara lembaga yang diwakilinya dan publik internal maupun eksternal. *Relationship* yang tidak harmonis beresiko menimbulkan ketidakpuasan publik yang pada akhirnya mengancam kelangsungan bisnis perusahaan. Selain itu, *relationship* juga berupaya menciptakan saling pengertian, kepercayaan, dukungan (Ruaslan, 2006: 27)

Jadi kemampuan humas untuk membangun hubungan yang positif antara lembaga yang diwakilinya dengan public internal dan eksternal. Juga berupaya menciptakan hubungan saling pengertian, kepercayaan, dukungan, kerja sama dan toleransi antara kedua belah pihak adalah Aktivitas yang dilakukan oleh BLH Provinsi Riau, terutama dalam Aktivitas menanggulangi tingkat pencemaran terutama sungai Siak yaitu melakukan koordinasi dengan lembaga setempat terutama BLH kota, Walhi, Jikalahari, Lemlit Universitas, Rona Lingkungan dan Pascasarjana ilmu lingkungan yang selalu mengkaji tentang kelestarian lingkungan hidup.

Munculnya LSM lingkungan ini ternyata memberi banyak arti bagi kelestarian lingkungan khususnya sungai Siak. Meski terkadang keberadaannya menyudutkan pemerintah daerah yang tidak becus mengurus kelestarian lingkungan sungai Siak di Provinsi Riau, bahkan LSM menuding Badan Lingkungan Hidup (BLH) Riau tebang pilih dalam menindak pelaku perusak lingkungan yang berakibat fatal terhadap kelestarian lingkungan terutama sungai Siak.

Adapun ruang lingkup tugas humas dalam sebuah organisasi lembaga antara lain meliputi aktivitas sebagai berikut:

- 1) Membina hubungan ke dalam (*Public internal*)

Yang dimaksud dengan publik internal adalah publik yang menjadi bagian dari unit/badan/lembaga atau organisasi itu sendiri (Ruslan, 2006: 23).

Aktivitas Humas BLH Provinsi Riau dalam menanggulangi tingkat pencemaran Sungai Siak telah melakukan atau membina hubungan ke dalam (Publik Internal), adapun koordinasi dan hubungan itu antara lain dengan pihak BLH daerah diseluruh Provinsi riau dan pemerintahan Kota Pekanbaru, ini salah satu bentuk unit atau badan dari BLH itu sendiri.

2) Membina hubungan keluar (*Public eksternal*)

Yang dimaksud public eksternal adalah public umum (Masyarakat). Mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran publik yang positif terhadap lembaga yang diwakilinya (Ruslan,2006: 23).

Aktivitas Humas BLH Provinsi Riau dalam menanggulangi tingkat pencemaran Sungai Siak telah melakukan atau membina hubungan keluar (Publik eksternal), adapun koordinasi dan hubungan itu antara lain dengan pihak LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) seperti pihak Walhi, Jikalahari, Rona Lingkungan dan lembaga masyarakat lainnya.

**c. *Back up Management***

Aktivitas Humas BLH Provinsi Riau telah melaksanakan dan memprogramkan pelaksanaan dukungan manajemen atau menunjang kegiatan lain seperti manajemen pengelolaan Limbah, untuk mencapai tujuan Aktivitas Humas BLH telah melakukan dan memprogramkan Pengelolaan tata guna Limbah, lahan dan tata air, terutama sistim kelola limbah B3 sudah dalam wacana program Badan Lingkunga Hidup.

Direncanakan oleh BLH Propinsi Riau untuk mengubah perilaku masyarakat agar dapat memanfaatkan kembali limbah-limbah yang berbahaya setelah di kelola bisa berdayaguna kembali. Namun hingga kini hasil wacana tersebut belum bisa direalisasikan karena faktor anggaran yang cukup tinggi, sejak tahun 2004 BLH Provinsi Riau telah membicarakan hal tersebut dengan Gubernur namun hingga saat ini masih mentah. Akan tetapi BLH Provinsi Riau tidak putus asa, kemudian melakukan kebijakan tersebut kepada perusahaan dan hotel yang berstandar untuk memiliki IPAL sehingga secara bertahap dapat menimalisasikan untuk pencegahan penyelamatan sungai Siak.

Menurut BLH Provinsi Riau kedepan diharapkan sistem kelola limba B3 ini telah direalisasikan meskipun program tersebut membutuhkan dana yang cukup lama dan memakan waktu yang cukup lama, namun harapan terletak dipundak pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar lebih mengutamakan program ini agar supaya lingkungan menjadi lebih terkendali dan jauh dari pencemaran yang berdampak pada kehidupan manusia.

Langkah berikutnya aktivitas yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup dalam menanggulangi pencemaran sungai siak adalah membangun *Septictank* komunal bagi masyarakat tempatan di bantaran sungai Siak dan para developer yang mendirikan perumahan d sepanjang sungai Siak di Kota Pekanbaru.

Selain menyiapkan septicktank komunal, dalam pendanaan yang sama juga akan dilakukan penghijauan diareal WTC dengan pepohonan. Tiga jenis

pepohonan yang akan ditanam adalah Belimbing Wuluh, Angsana, Mahoni. Program itu bersamaan pula dengan pembangunan turap tambahan. Turap yang diareal WTC menjadi tugas dan kewenangan Dinas Kimpraswil, maka turap yang akan dibangun melalui program ini akan beraa diluar WTC. Namun konsepnya juga akan berbeda, karena kita sedang mendisain turap yang masih bisa ditumbuhi tumbuhan. Ketiga program ini tambah Makruf menjadi bagian dari tugas BLH Provinsi Riau selain tetap terus melakukan pemantauan kualitas air.

**d. *Good Image Maker***

Menciptakan citra atau publikasi yang positif merupakan prestasi, reputasi dan sekaligus menjadi tujuan utama bagi aktivitas humas BLH dalam menanggulangi tingkat pencemaran sungai Siak di Kota Pekanbaru, dalam melaksanakan manajemen kehumasan yaitu membangun citra atau nama baik lembaga/organisasi dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Dengan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya diharapkan humas tidak hanya mampu membangun citra identitas instansi, tetapi juga mampu menghadapi krisis (*Facing of Crisis*), dan inilah terjadi sekarang, telah terjadi krisis dilingkungan ini, pencemaran sungai Siak sudah menjadi isu dimana-mana terutama di Kota Pekanbaru, dan disinilah fungsi Humas BLH Provinsi Riau sebagai lembaga pemerintah yang mempunyai andil dalam proses pemulihan sungai tersebut, Humas BLH Provinsi Riau telah melakukan berbagai hal, corong buat masyarakat dalam keluhan tentang lingkungan ini suatu aktivitas dalam menciptakan citra yang positif dimata masyarakat dan pemerintah.

Kegiatan kehumasan disebuah perusahaan menjadi sebuah keharusan untuk membangun citra perusahaan. Kehumasan dipahami menjadi sebuah senjata yang ampuh untuk mempengaruhi opini publik kepada perusahaan. Perusahaan yang diwakili oleh humas dalam pembentukan citra harus memberikan informasi yang lengkap kepada publik untuk menjawab semua kebutuhan dan keinginan obyek sasaran. Pemahaman yang berasal dari suatu informasi yang tidak lengkap akan menghasilkan citra yang tidak sempurna (Kasali, 2005: 163).

Citra adalah tujuan utama, dan sekaligus merupakan reputasi dan prestasi yang hendak dicapai bagi dunia hubungan masyarakat (kehumasan) atau publik relations. Pengertian citra itu sendiri abstrak (intangible) dan tidak dapat diukur secara matematis, tetapi wujudnya bisa dirasakan dari hasil penilaian baik atau buruk. Seperti penerimaan dan tanggapan baik positif maupun negatif yang khususnya datang dari publik (khalayak sasaran) dan masyarakat luas pada umumnya (Ruslan,2006: 75).

## **B. Faktor Pendukung dan Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Menanggulangi Tingkat Pencemaran Sungai Siak di Kota Pekanbaru**

### **1. Faktor Pendukung**

Aktivitas Humas Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau dalam menanggulangi pencemaran sungai Siak di Kota Pekanbaru dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, dimana faktor tersebut ada yang mendukung kelancaran aktivitas humas dalam menanggulangi tingkat pencemaran sungai Siak, dan ada juga menjadi faktor penghambat aktivitas humas tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis dan dari hasil wawancara, penulis menemukan bahwa ada beberapa faktor yang dijadikan pendukung aktivitas Humas Badan Lingkungan Hidup dalam menanggulangi tingkat pencemaran sungai Siak. Faktor pendukung tersebut yaitu adanya kerjasama terutama antara pihak BLH Provinsi dengan pihak BLH Kota Pekanbaru dan BLH se-Provinsi Riau terutama yang berada di sepanjang aliran sungai Siak, bukan itu saja Badan Lingkungan Hidup juga menjalin kerjasama dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) seperti : Sebut saja Rona Lingkungan Universitas Riau, Yayasan Elang, Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) dan Jikalahari memberikan warna tersendiri terhadap persoalan-persoalan lingkungan.

Kehadiran LSM lingkungan ini ternyata memberi banyak arti bagi kelestarian lingkungan khususnya sungai Siak. Meski terkadang keberadaannya menyudutkan pemerintah daerah yang tidak becus mengurus kelestarian

lingkungan sungai Siak di Provinsi Riau, bahkan LSM menuding Badan Lingkungan Hidup (BLH) Riau tebang pilih dalam menindak pelaku perusak lingkungan yang berakibat fatal terhadap kelestarian lingkungan.

Adapun juga Badan Lingkungan Hidup provinsi Riau dalam menanggulangi tingkat pencemaran sungai Siak di Kota Pekanbaru, Badan Lingkungan Hidup telah melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian, dimana pihak kepolisian akan bekerjasama dengan Badan Lingkungan Hidup dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan masyarakat dan para pelaku industri yang menyebabkan terjadinya pencemaran.

Penelitian Internal secara berkala sangat mendukung Humas Badan Lingkungan Hidup dalam menanggulangi tingkat pencemaran sungai Siak di Kota Pekanbaru, fungsinya untuk mengetahui apakah air sungai siak mengalami pencemaran yang tinggi atau mengalami penurunan. Hasil dari laporan tersebut kemudian sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah untuk mengetahui kegiatan atau usaha-usaha masyarakat yang mempengaruhi kualitas air sungai siak. Ini suatu langkah mengatasi persoalan pencemaran sungai Siak untuk jangka panjang, Sedangkan untuk jangka pendek BLH Riau melakukan koordinasi dengan BLH Kota/ Daerah untuk melakukan pemantauan daerah wilayah masing-masing dengan memperketat himbauan bahkan sanksi kepada masyarakat yang terbukti melakukan kejahatan lingkungan.

## 2. Faktor Penghambat

Sedangkan salah satu faktor penghambat yang ditemukan penulis pada aktivitas Humas BLH dalam menanggulangi tingkat pencemaran di sungai Siak, mengapa sungai Siak belum diperhatikan secara serius yang menjadi faktornya adalah dana, dimana untuk melakukan penelitian pengambilan sampel sungai siak saja dan menguji kualitas airnya belum bisa dilakukan secara efektif, sebab hingga saat ini BLH Riau belum memiliki laboratorium sendiri.

Inilah yang menjadi salah satu faktor penghambat program BLH Riau dalam melakukan aktivitasnya, sejauh ini untuk melakukan penelitian tersebut BLH Riau masih menumpang ditempat lain untuk menanti pekerjaannya. Sehingga untuk memperlancar kerja BLH Riau dalam mengatasi pencemaran sungai Siak perlu adanya laboratorium tersebut.

Secara substansial keberadaan lobaratorium merupakan salah satu faktor pendukung terwujudnya kinerja yang efektif. Perangkat kerja yang mendukung selama ini disebut-sebut sebagai penyebab pelaksanaan teknis dilapangan menjadi sedikit terganggu. Untuk tingkat propinsi saja BLH Riau belum memiliki laboratorium sendiri apalagi BLH tingkat Kota/ Kabupaten, seharusnya hal in menjadi catatan penting bagi pemerintah Provinsi Riau lebih memaksimalkan kinerja baik BLH Riau maupun Kota/ Kabupaten.

Faktor penghambat lainnya kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan terutama sungai, Jadi dilihat dari sebagian besar masyarakat belum mengetahui pentingnya menjaga kebersihan lingkungan,

terbukti banyak diantara masyarakat kota Pekanbaru membuang sampah tanpa berfikir panjang bahwa perilakunya berdampak buruk terhadap sungai siak. Namun ironisnya banyak masyarakat menuding bahwa kesiapan pemerinta untuk menanggulangi kebersihan sungai siak belum di optimalkan. Ini dibuktikan sekitar sungai siak belum ada tong sampah yang siap menampung bagi masyarakat sekitar sungai siak.

Lemahnya penegakan supermasi hukum salah satu faktor penghambat yang sangat berpengaruh terhadap aktifitas pengendalian pencemaran sungai Siak, karena lemahnya hukum dan kurangnya kontrol dari pihak yang berwenang akan membuat kurang efektifnya aktivitas yang akan dilakukan oleh humas BLH dalam menanggulangi tingkat pencemaran sungai Siak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dalam menilai Aktivitas Humas Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau dalam menanggulangi tingkat pencemaran sungai Siak di Kota Pekanbaru, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Aktivitas Humas BLH Provinsi Riau dalam menanggulangi tingkat pencemaran Sungai Siak di Kota Pekanbaru telah melakukan tugas sebagaimana fungsinya, namun di lapangan belum sesuai dengan harapan yang diinginkan, adapun empat tahapan yang dijalankan diantaranya:

- a. *Communicator*

Melakukan sosialisasi berupa himbauan dan mendirikan papan larangan membuang sampah di sungai Siak, akan tetapi hal tersebut tidak berjalan dengan efektif sebab kurangnya penyediaan tong sampah dari BLH, melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan perusahaan, walaupun telah diadakan penyuluhan hal tersebut tidak berjalan dengan efektif karena dipengaruhi oleh budaya masyarakat yang sulit untuk sadar akan kelestarian lingkungan.

*b. Relationship*

Aktivitas menanggulangi tingkat pencemaran terutama sungai Siak yaitu melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga setempat terutama BLH kota, Walhi, Jikalahari, Lemlit Universitas, Rona Lingkungan dan Pascasarjana ilmu lingkungan yang selalu mengkaji tentang kelestarian lingkungan hidup.

*c. Back up Management*

Aktivitas Humas BLH Provinsi Riau telah melaksanakan dan memprogramkan pelaksanaan dukungan manajemen atau menunjang kegiatan lain seperti manajemen pengelolaan Limbah, untuk mencapai tujuan Aktivitas Humas BLH telah melakukan dan memprogramkan Pengelolaan tata guna Limbah, lahan dan tata air, terutama sistem kelola limbah B3 sudah dalam wacana program Badan Lingkungan Hidup.

*d. Good Image Maker*

Menciptakan citra atau publikasi yang positif merupakan prestasi, reputasi dan sekaligus menjadi tujuan utama bagi aktivitas humas BLH dalam menanggulangi tingkat pencemaran sungai Siak di Kota Pekanbaru, dalam melaksanakan manajemen kehumasan yaitu membangun citra atau nama baik lembaga/organisasi dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.

2. Faktor pendukung dalam melakukan penanggulangan pencemaran sungai Siak juga masih relatif belum memadai. Ini terbukti, hingga sekarang BLH Provinsi Riau belum memiliki laboratorium sendiri untuk melakukan penelitian secara berkala, yakni pada musim penghujan dan pada musim kemarau, sehingga dalam pelaksanaan masih terganggu.
3. Kendala yang dihadapi BLH Provinsi Riau dalam menjalankan program penanggulangan tingkat pencemaran sungai Siak adalah alokasi dana yang dimiliki BLH Provinsi Riau sangat terbatas, sehingga dalam menjalankan aktivitas humasnya mengalami kendala dilapangan. Kemudian factor kesadaran masyarakat yang masih rendah merupakan kendala yang paling besar dalam menjalankan aktivitas pencemaran di sungai Siak, di samping itu kendala yang tak kalah sulit penagakkan supramasi hukum yang masih lemah sehingga para perusak lingkungan dengan leluasa berbuat.

## **B. Saran-saran**

Dari hasil penelitian tentang Aktivitas Humas Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau dalam menanggulangi tingkat pencemaran sungai Siak di Kota Pekanbaru, maka penulis dapat menyarankan :

1. Humas Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau dan Bidang pengendalian pencemaran, yang dalam hal ini hendaknya mengambil langkah strategis dan berkesinambungan dalam menjalin hubungan dengan masyarakat setempat,

LSM, dan pihak yang berwajib dalam mewujudkan pengendalian pencemaran lingkungan sungai Siak.

2. Humas Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau dan badan penegak hukum serta pemerintahan kota setempat hendaknya mengambil langkah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi sungai terhadap kehidupan dan akan bahaya apabila terjadinya pencemaran sungai.
3. Menganggarkan secara khusus alokasi dana untuk pelaksanaan teknis dalam menanggulangi pencemaran sungai Siak yang semakin memprihatinkan, dan meningkatkan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugasnya.
4. Diharapkan BLH Provinsi Riau meningkatkan sosialisasi secara rutin, kemudian mempersiapkan tong sampah disekitar sungai Siak agar mengurangi aktivitas masyarakat yang langsung membuang sampah ke sungai Siak. Selain itu diharapkan BLH melakukan penertiban kepada penjual jagung dan rumah makan disekitar sungai Siak untuk mengidahkan membuang sampah pada tempatnya.
5. Pemerintah dalam hal ini BLH Provinsi Riau semestinya menegakan supermasi hukum dengan melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian sesuai dengan perangkat hukum yang telah berlaku, kemudian menindak oknum-oknum atau pelaku kejahatan yang secara sengaja membuang limbah ke sungai Siak.

6. Semoga penelitaian ini dapat ditindak lanjuti oleh peneliti lain untuk dikaji secara lebih mendalam dalam membahas masalah yang sama dengan menggunakan metode yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asdak, Chai. 2007. *Hidrologi Pengendalian daerah aliran Sungai*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press
- \_\_\_\_\_ 2011. *Hidrologi Pengendalian daerah aliran Sungai*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press
- Bungin, Burhan. 2010. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rajawali Pers
- \_\_\_\_\_ 2010. *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Cet 8* ,Jakarta : Rajawali Pers
- Cutlip, M. Scott, dkk. 2006. *Effective Public Relations, Edisi ke-9*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group
- Djaja, Danan. 1985. *Peranan Humas dalam Perusahaan*, Bandung: Alumni
- Danusaputro, M. 1980, *Hukum Lingkungan, buku I*, Bandung: Bina Cipta
- Effendy, Onong Uchjana. 1993. *Human Relations dan Public relations*, Bandung: Mandar Maju
- Hamzah, A. 2005. *Penekanan Hukum Lingkungan Cet 1*, Jakarta: Sinar Grafika
- Kasali, Renald. 2005, *Strategi Komunikasi Pemasaran, integrasi iklan Publik Relation dan Promosi*, Jakarta: Quantum
- Manan, S. 1979. *Pengaruh Hutan dan Manajemen DAS Departemen Kehutanan*, Bogor: Fakultas Kehutanan IPB
- Moleong, Lexi. 2004. *Humas Membangun Citra dan Komuniikasi*, Bandung: Rosdakarya
- Mulyadi, Aras. 2005. *Hidup Bersama Sungai Fokus Provinsi Riau*, Pekanbaru: Unri Press Pekanbaru
- Mustari.1985. *Penemuan Hukum sebuah pengantar*, Yogyakarta: Liberty
- Rakhmat, Jalaludin. 2001. *Metode Penelitian Komunikasi, Cetakan XI*, Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya

- Rudy, T, May. 2005. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Internasional*, Bandung: Revika Aditama
- Ruslan, Rosady. 1999. *Manajemen Publik Relation dan Media Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- 2003. *Metodologi Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Grafindo Persada
- 2006. *Manajemen Publik Relation dan Media Komunikasi rev 7*, Jakarta: Grafindo Persada
- 2008 *Manajemen Publik Relation dan Media Komunikai Konsep dan Amplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Siagian, Sondang. 1996. *Filsafat Administrasi*, Jakarta: CV Masagug
- Soerangjiwa. 1987. *Konservasi Tanah dan air*, Jakarta: Departemen Transmigrasi
- Suparni, N. 1992. *Pelestarian Pengelolaan Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Samandha. 2004. *Hukum dan Masalah Lingkungan Hidup*, Bandung: Bina Cipta
- Siswanto, Bambang. 1995, *Hubungan Masyarakat Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Sudharsono, N.B. 1991. *Aspek Hukum*, Semarang: Satya Wancana
- Suhaimi, Fadlah. 2011. *Thesis, Upaya Penegakkan Hukum dalam Pemanfaatan Daerah aliran Sungai Siak*, Pekanbaru
- Wardhana, W. 2001. *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Yogyakarta: Andi
- Yulianita, Neni. 2007. *Dasar-Dasar Public Relations*. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM Unisba.

**Sumber Lain :**

Undang-undang Indonesia Pasal 1 butir 12 UU No. 23 tahun 1997 tentang  
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Surat Kabar Harian Kompas 10 Juni 2004

[www.riauterkini.com](http://www.riauterkini.com) (*Kerusakan Das Siak Kasus Diskusi serius*), 30 April 2010